



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*  
**DINAS KELAUTAN & PERIKANAN**  
**TAHUN 2020**

---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkat izin dan ridha-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Oleh karenanya Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan sebagai alat ukur terhadap capaian keberhasilan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020. Walaupun data yang ditampilkan pada LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini masih merupakan data sementara diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan datang dan tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan atau ketidaksempurnaan baik dalam penyajian formulasinya maupun dalam penyajian isinya. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa diperlukan bagi kesempurnaan laporan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini diucapkan terima kasih.

Makassar,     Maret 2021  
Plt. KEPALA DINAS



**Ir. HARY RUSTAM T, MM**  
Pangkat : Pembina TK I  
N I P : 19670305 199903 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Susunan Organisasi.....	1
1.2. Tugas Pokok.....	5
1.3. Fungsi.....	7
1.4. Isu Strategis.....	10
1.5. Sistematika Penyajian .....	13
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Perencanaan.....	14
2.2. Perjanjian Kinerja.....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
3.1. Capaian Kinerja Sasaran / IKU .....	21
3.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran IKU.....	24
3.3. Realisasi Anggaran .....	75
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sebaran PNSD Tahun 2020 Berdasarkan Golongan / Ruang .....	3
Tabel 2. Sebaran PNSD Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	4
Tabel 3. Data Pejabat Struktural Tahun 2020 .....	4
Tabel 4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	11
Tabel 5. Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 20120 .....	19
Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran /IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2020 .....	21
Tabel 7. Predikat Capaian Kinerja Sasaran /IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2020 .....	23
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran I .....	25
Tabel 9. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran I dan Capaian Terhadap terhadap target RPJMD .....	26
Tabel 10. Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2020 .....	27
Tabel 11. Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik .....	30
Tabel 12. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran I .....	30
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran II .....	34
Tabel 14. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran II dan Capaian terhadap target RPJMD .....	35
Tabel 15. Realisasi produksi perikanan tangkap , budidaya dan garam tahun 2016 – 2020 .....	36
Tabel 16. Perkembangan produksi komoditi unggulan tahun 2016 -2020 .....	38
Tabel 17. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran II .....	41
Tabel 18. Perkembangan produksi udang windu per kab/kota tahun 2018 -2020 .....	44
Tabel 19. Perkembangan Produksi Rumput Laut Per Kab/Kota tahun 2018-2020 .....	45
Tabel 20. Daftar pelabuhan dan alokasi pembangunan Sarana dan Prasarana tahun 2019-tahun 2020 .....	47
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Sasaran III .....	52
Tabel 22. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran III dan Capaian terhadap target RPJMD .....	53
Tabel 23. Realisasi Ekspor Tahun 2017 – 2020 .....	55
Tabel 24. Volume ekspor komoditi unggulan .....	56
Tabel 25. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran III .....	56
Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV .....	58

Tabel 27. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran IV dan Capaian terhadap target RPJMD .....	59
Tabel 28. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran IV .....	61
Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Sasaran V .....	64
Tabel 30. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran IV dan Capaian terhadap target RPJMD .....	65
Tabel 31. Luas Kawasan Konservasi daerah yang dikelola.....	66
Tabel 32. Upaya Konservasi Kawasan .....	68
Tabel 33. Realisasi Kawasan Lindung Perairan tahun 2015 – 2020 .....	68
Tabel 34. Realisasi Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis Yang aman.....	70
Tabel 35. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran V .....	71
Tabel 36. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	75
Tabel 37. Realisasi Anggaran Dinas kelautan dan Perikanan TA. 2020 .....	76
Tabel 38. Realisasi keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan TA. 2020 .....	76

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Perkembangan Produksi Garam .....	40
Perkembangan Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sul Sel Tahun 2016 - 2020 .....	41
Perkembangan Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 - 2020 .....	54
Realisasi Nilai Tukar nelayan Per bulan tahun 2020 .....	60
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan tahun 2016 – 2020 .....	61

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2016 telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan.

Adapun uraian Adapun uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada struktural organisasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Pergub 86 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

### **1.1. SUSUNAN ORGANISASI**

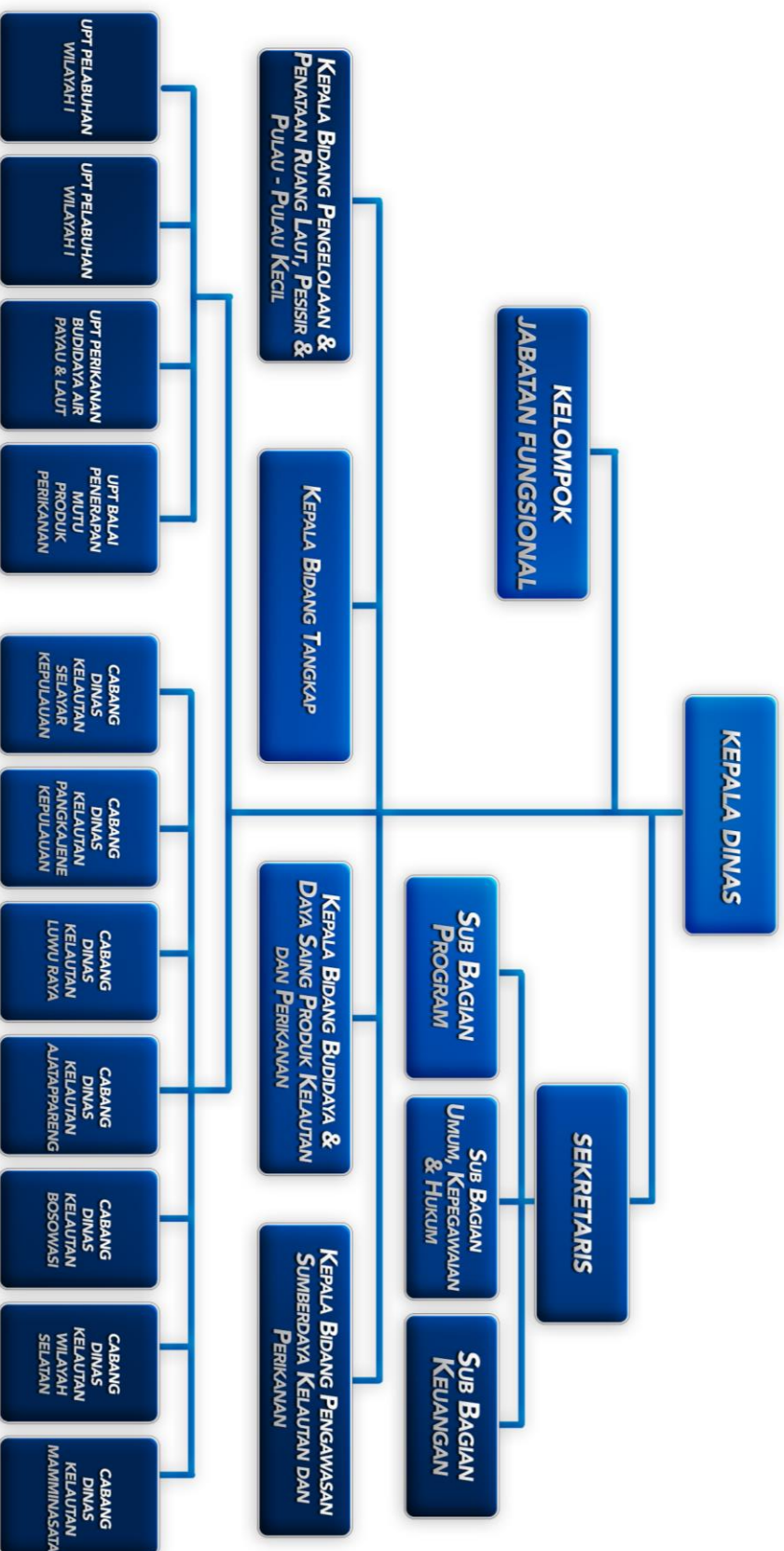
Organisasi perangkat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3 Sub Bagian
3. Kepala Bidang (empat)
4. Kepala UPTD
5. Kepala Cabang Dinas Kelautan (CDK)

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

# BAGAN STRUKTUR

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

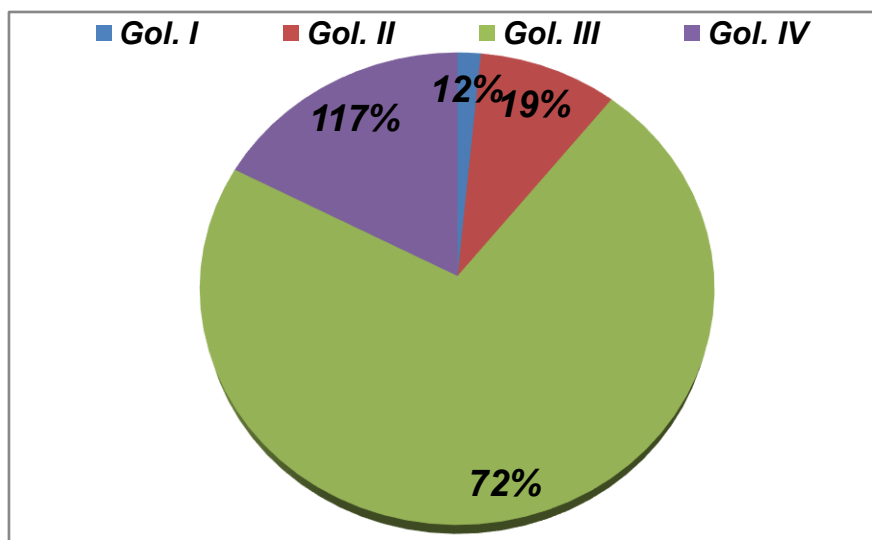




Dalam penunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu faktor yang penting adalah faktor Sumberdaya Manusia Aparatur. Adapun jumlah PNS yang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sul-Sel sampai dengan akhir bulan Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Sebaran PNS Dinas Kelautan dan PerikananProv. Sul-Sel TA. 2020 Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Gol. Ruang	A		B		C		D		Jumlah		Total
		L	W	L	W	L	W	L	W	L	W	
1	I	0	0	2	0	0	1	0	0	2	1	3
2	II	1	0	3	0	2	0	9	2	15	2	17
3	III	6	5	10	6	15	22	31	44	62	77	139
4	IV	14	10	11	1	0	0	0	0	25	11	36
Jumlah		21	15	26	7	17	23	40	46	104	91	195



Gambar 1. Persentase Sebaran PNS TA. 2020 Berdasarkan Golongan/Ruang



Sebaran PNSD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menurut pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2. Sebaran PNSD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2020  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah	
		Pria	Wanita	
1	S3	2	2	4
2	S2	29	25	54
3	S1	48	60	108
4	Sarjana Muda	7	1	8
5	SMA	16	2	18
6	SMP	0	1	1
7	SD	2	0	2
	<b>Jumlah</b>	<b>104</b>	<b>91</b>	<b>195</b>

Tabel 3. Data Pejabat Struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah	
		Pria	Wanita	
1	Eselon II	-	-	0
2	Eselon III	15	1	16
3	Eselon IV	23	10	33
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>49</b>

## **1.2. TUGAS POKOK**

Tugas Pokok Pejabat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

### **Sekretaris**

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas

### **Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil**

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan penataan ruang laut, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

### **Bidang Perikanan Tangkap**

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perikanan tangkap.

Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan, kebijakan teknis perikanan budidaya dan daya saing produk kelautan dan perikanan.

### **Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

### **UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 dan 2**

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.

### **UPT Balai Penerapan Mutu Produk Hasil Perikanan**

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk, dan penerapan persyaratan Standar Nasional Indonesia pada produk hasil perikanan.

### **UPT Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut**

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional produksi, pelayanan teknologi budidaya ikan air payau/laut, pemantauan kesehatan lingkungan, dan jejaring pemuliaan ikan.

### **Cabang Dinas Kelautan**

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja.

Dengan Peraturan Gubernur No.03 Tahun 2018 telah, dibentuk Cabang Dinas Kelautan, masing-masing:

- a. Cabang Dinas Kepulauan Selayar, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Selayar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Cabang Dinas Pangkajene dan Kepulauan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pangkep yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan;
- c. Cabang Dinas Luwu Raya, Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara;
- d. Cabang Dinas Ajatappareng, Kelas A berkedudukan di Kota Pare-Pare yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang;
- e. Cabang Dinas Bosowasi, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai;
- f. Cabang Dinas Wilayah Selatan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bulukumba;
- g. Cabang Dinas Wilayah Mamminasata, Kelas A berkedudukan di Kota Makassar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar

### **1.3. FUNGSI**

#### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

#### **Sekretaris**

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### **Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil**

Kepala Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### **Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Bidang Perikanan Tangkap**

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perikanan Tangkap;
- c. Pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang perikanan tangkap
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 dan 2**

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal Perikanan;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

**UPT BALAI PENERAPAN MUTU PRODUK HASIL PERIKANAN**

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan penerapan persyaratan Standar Nasional Indonesia pada produk hasil perikanan;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk hasil perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

**UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT**

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan teknik produksi budidaya ikan air payau/laut, pelayanan teknologi dan jejaring pemuliaan ikan;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan teknik produksi budidaya ikan air payau/laut, pelayanan teknologi dan jejaring pemuliaan ikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

**CABANG DINAS KELAUTAN**

Kepala Cabang Dinas Kelautan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diatas telah ditetapkan target pembangunan kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Capaian Perjanjian kinerja tersebut dituangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2020 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sul-Sel tahun 2020 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban yang mengacu pada Perpres RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.4. ISU STRATEGIS**

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis, maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari permasalahan pembangunan daerah yaitu :

1. Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah,
2. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing,
3. Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang,
4. Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok,
5. Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi,
6. Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing,



7. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai
8. Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran.

*Tabel 4 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan*

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Pengelolaan sumberdaya dan kebutuhan sarana dan prasarana tidak terstruktur
2	Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penguatan aparatur yang terampil berinovasi dan pembinaan daya saing produk perikanan yang masih rendah
3	Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang	Sarana dan prasarana pelabuhan belum Optimal	Pembinaan terhadap nelayan dan petugas pelabuhan belum Optimal
4	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	Kualitas SDM nelayan sebagian besar masih relatif rendah
5	Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada Ponggawa Sawi	Kurangnya informasi akses perbankan	Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan terbatas

*Tabel 4 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan*

6	Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing	Kegiatan pengawasan belum optimal	Kurangnya sarana prasarana dan SDM penegak hukum di laut
7	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai	Zona pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir belum maksimal dipedomani	Dokumen RZWP3K dan rencana alokasi ruang belum dimanfaatkan
8	Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Kebijakan "limited access" belum diterapkan secara menyeluruh.
9	Mekanisme pengumpulan data perikanan masif bersifat masif dan Belum adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi	Sistem data belum terkoordinasi dengan baik	Sistem pendataan dan informasi perikanan yang belum andal dan masih parsial

## **1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

### **Bab II – Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja**

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **Bab IV – Penutup**

Simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

#### **2.1. PERENCANAAN**

Dalam mendukung capaian sasaran disusun program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan secara bersama-sama yang saling terkait dan saling memperkuat satu dengan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda juga turut menentukan keberhasilan agenda lainnya oleh sebab itu, maka setiap tahun kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan ke dalam Dokumen RKPD sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional. RKPD perubahan 2020 memperhatikan rancangan dokumen Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam rangka penanganan kondisi ekonomi pasca pandemik Covid-19 dan telah terjadi Refocusing anggaran sehingga program strategis tersebut didukung oleh beberapa program pendorong dalam mendukung kebijakan pemerintah. Sektor kelautan dan perikanan sebagai prime mover dalam pembangunan ekonomi ke depan, dengan mengacu pada RKP Nasional, RKPD Perubahan Daerah, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 dan rancangan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2023. Arah kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Daerah Tahun 2020 memperhatikan kebijakan untuk penanganan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Program Prioritas **Hilirisasi Sektor Perikanan** maka dengan mengacu pada pernyataan Visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan yaitu menjadikan :

**“Sulawesi Selatan Yang  
Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”**

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemahkan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter” dengan penjelasan Visi adalah Inovatif yaitu Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”, Kompetitif yaitu Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”, Produktif yaitu Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”, Inklusif yaitu Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”. Berkarakter yaitu Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif  
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi. Pokok Visi adalah Inovatif dan Inklusif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel*

Membangun infrastruktur dalam menguatkan inter-konektivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir. Pokok Visi adalah Produktif dan Inklusif

3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif

Mengembangkan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah . Pokok Visi adalah Produktif

4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan ipteks tanpa hambatan bagi seluruh warga,menjamin akses layanan kesehatan ber-kualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian danpemajuan kebudayaan daerah Pokok Visi adalah Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.

5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan.

Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Pokok Visi adalah Kompetitif .

Pelaksanaan Misi dalam mewujudkan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan:

**Misi 5:**

**Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan**

Misi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah dengan memperhatikan masyarakat yang “Sehat dan Cerdas” serta “Mandiri dan Sejahtera”.

Tujuan :

Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing

**Sasaran :**

1. Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi
2. Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan

Didukung oleh program :

**Program Hilirisasi Perikanan**

Program ini adalah kelompok prioritas (KP) yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikatornya fokus pada nilai hilirisasi produk. Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 yaitu Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi baik pada pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengembangan usaha garam dan pengembangan usaha pengolahan sampai tahun 2019. Adapun tujuan program adalah (1) Penerapan inovasi teknologi untuk peningkatan produksi dan pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya. Selain itu komoditas udang, bandeng dan rumput laut tetap menjadi komoditas unggulan sehingga perlu digalakkan dalam rangka peningkatan produksi budidaya. Sasaran produksi yang akan dicapai pada tahun 2020 yakni, sebesar 4,6 juta ton. Adapun produksi komoditas unggulan pada tahun 2020, untuk komoditi udang 51.035



ton, Bandeng 187.575 ton dan rumput laut 4.388.800 ton (*Gracillaria* spp 1.160.860 ton dan *Eucheuma* spp 3.227.940 ton). Program tersebut diarahkan untuk menumbuhkan kembangkan industri strategis perikanan di Sulawesi Selatan dengan prioritas usaha adalah agroindustri dan industri yang memiliki keterkaitan industri/pasar di daerah lain termasuk luar negeri, melalui usaha ini akan memicu laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpuh pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang, Bandeng, Tuna. Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan dan perluasan jejaring dan kemitraan serta mengoptimalkan hilirisasi produk yang dapat memberikan dampak perekonomian daerah. Selain pengembangan usaha perikanan budidaya juga diarahkan pada optimalisasi pengembangan usaha perikanan tangkap berkelanjutan merupakan upaya revitalisasi dan perbaikan orientasi pembangunan perikanan berkelanjutan dengan menekankan pada tiga aspek kajian yang merupakan dasar pertimbangan arahan kebijakan dalam melahirkan program dan kegiatan, meliputi:

1. Inovasi dan pengembangan teknologi sarana dan prasarana penangkapan ikan ramah lingkungan,
2. Pendalaman pengetahuan dan pemahaman terhadap target tangkapan, dan
3. Peningkatan kapasitas nelayan dengan sarana prasarana usaha perikanan tangkap yang memadai

Ketiga aspek kajian ini merupakan ruang lingkup pengembangan dan pembangunan perikanan tangkap yang menentukan keberhasilan dan tingkat produktifitas unit usaha. Kajian teknologi penangkapan ikan (*fishing technology*) lebih diarahkan pada peningkatan produktifitas penangkapan sebagai target pencapaian dengan indikator kinerja diarahkan

pada efektifitas dan efisiensi upaya penangkapan ikan yang dilakukan. Bagian dari ruang lingkup kajian ini meliputi:

- a) Penerapan teknologi penangkapan ikan berbasis potensi ruang dengan menetapkan komoditas unggulan sebagai target tangkapan,
- b) Pemanfaatan teknologi alat bantu penangkapan ikan seperti, penggunaan Global Position Service (GPS), cahaya, umpan, dan resonansi suara
- c) Penanganan dan pengendalian teknologi penangkapan ikan yang overfishing dan tidak ramah lingkungan (destructive fishing) melalui pengelolaan jumlah dan jenis alat tangkap, pengaturan ukuran mata jarring untuk selektifitas target tangkapan, dan pembatasan daerah operasi penangkapan ikan pada zona terlarang. Gambaran umum potensi pembangunan perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga karakteristik wilayah pesisir yang khas/spesifik, yaitu perairan wilayah pesisir Teluk Bone, wilayah pesisir Laut Flores, dan wilayah pesisir Selat Makassar. Ketiga karakteristik wilayah perairan ini seharusnya mampu dioptimalkan pemanfaatannya sebagai potensi yang sangat besar dan luar biasa dalam mengakselerasi pembangunan perikanan tangkap. Kajian ikan target tangkapan (fish target) dan daerah penangkapan ikan (fishing ground) dititikberatkan pada analisis entitas dan potensi ruang yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagai wilayah kajian dengan segala potensi sumberdaya ikan yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup kajian target tangkapan akan mendeskripsikan produksi dan potensi sumberdaya ikan yang berada pada suatu daerah penangkapan ikan melingkupi komposisi jenis, ukuran ikan, jumlah hasil tangkapan sebagai total produksi dan jumlah stok sumberdaya ikan, ekosistem dan habitat keberadaan target tangkapan, dan tingkah laku ikan target tangkapan. Pengetahuan dan pemahaman tingkah laku ikan target tangkapan terhadap penguasaan karakteristik daerah penangkapan merupakan acuan dasar dan basis pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Diperlukan manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, baik yang bersifat teknis pada teknologi penangkapan ikan maupun yang

bersifat manajemen dalam pengelolaan base-line data secara sistematis dan terstruktur dari waktu ke waktu untuk memperbaiki dan mengembangkan kondisi eksisting yang telah dicapai. Peluang pengembangan perikanan tangkap dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan yang tersebar di 19 kabupaten/kota dengan memfasilitasi pelayanan kepada nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan higienisasi sarana prasarana pelabuhan perikanan. Pengembangan usaha garam juga menjadi prioritas pada program hilirisasi perikanan dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 4 kabupaten yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar, kabupaten Pangkep dan kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas prasarana seperti gudang garam kapasitas 1000 ton, penerapan geomembran, integrasi lahan minimum 15 Ha per lokasi PUGAR dan pemberdayaan masyarakat pengembang usaha garam.

#### **Program Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan**

Program ini diarahkan untuk mendukung keberhasilan program Hilirisasi Perikanan dimana dibutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014. Pemerintah provinsi selaku Pembina antar kabupaten/kota akan efektifkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahun 2020 program ini tidak dilaksanakan disebabkan adanya refocusing anggaran.

#### **Program Penerapan Mutu, Pengembangan Usaha dan Daya Saing**

Program ini diarahkan untuk peningkatan nilai tambah melalui peningkatan mutu dan jenis olahan hasil perikanan, usaha ini akan menciptakan peningkatan dan pemerataan pendapatan khusus para pelaku usaha olahan hasil perikanan. Tujuan

pemasaran akan tercapai melalui usaha Peningkatan sumberdaya manusia dalam hal ini adalah pelaku usaha, Peningkatan sarana olahan dan kelembagaan usaha, Peningkatan informasi pasar, Peningkatan ketersediaan bahan baku olahan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha terhadap industri – industri Pengolahan Hasil Perikanan di Sulawesi Selatan sehingga dapat menjadi pusat pelayanan dari industri–industry yang ada didaerah atau diluar provinsi. Industri yang dimaksud yaitu industri pengolahan rumput laut, udang dan ikan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka, ditempuh pelayanan prima berupa a. Intensifikasi pengujian mutu, b. Intensifikasi terhadap informasi pasar dan persyaratannya, c. Pembinaan dan pengawasan penerapan standarisasi terhadap produk perikanan. Program ini juga diarahkan meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tahun 2020 program ini tidak dilaksanakan disebabkan adanya refocusing anggaran.

#### **Misi 5**

#### **Meningkatkan produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang berkelanjutan**

**Tujuan :** Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup

**Sasaran :** Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

#### **Program Pengawasan, Konservasi, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir Dan Laut**

Program ini diarahkan pada pengembangan pengembangan dan pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu program yang mendukung penanganan kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perubahan social ekonomi di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial

masyarakatnya. Nelayan kecil merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan social ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Adapun salah satu strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yaitu meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Selain itu program ini diarahkan pada upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya agar dapat menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Usaha tersebut sebagai perwujudan bagi Sulawesi Selatan sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang berkeadilan. Tujuan yang dapat dicapai adalah untuk meningkatkan daya tarik wilayah terhadap investor termasuk kunjungan wisata dan sekaligus juga dapat memberi iklim yang kondusif bagi Sulawesi Selatan dalam pengembangan kegiatan konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Program ini juga diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan membentuk system pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan khususnya untuk pengawasan destructive fishing, illegal fishing, pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan, penataan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perikanan. Program ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan organisasi masyarakat lokal sebagai upaya strategis dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Usaha yang dapat dilakukan dalam mendukung kegiatan yaitu :

1. Sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terhadap larangan penggunaan bahan dan alat tangkap yang dapat merusak sumberdaya perikanan.

2. Intensifikasi pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan bahan terlarang untuk penanganan hasil perikanan
3. Pelatihan kesadaran masyarakat dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan sumberdaya perikanan
4. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat Pengawas Perikanan di setiap daerah
5. Himbauan dan larangan terhadap pengambilan terumbu karang dan biota - biota tertentu yang dianggap telah hampir punah.

Melalui usaha tersebut diatas, maka diharapkan tingkat kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan berkurang dan terjadi peningkatan produktivitas tangkapan ikan.

**Program Sekretariat :**

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

**2.2. PENETAPAN KINERJA**

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 mempunyai komitmen kinerja yang terdiri dari sasaran, indikator dan target tahun 2020.

Berdasarkan pertimbangan perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yaitu keadaan pasca pandemik Covid 19 yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan belanja,

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta Percepatan pelaksanaan program Prioritas maka dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana berikut.

*Tabel 5. Penetapan Kinerja / IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2020 (PK Awal)*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	KETERANGAN
I. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	1.	Nilai saki OPD (%)	80,87	
	2.	Rata- rata capaian kinerja perangkat daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) (%)	95%	
	3.	% ASN Nilai SKP kategori baik (%)	83	
II. Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor perikanan	4.	Produksi perikanan (ton)	5.558.740,80	
	5.	Kontribusi PDRB Perikanan (%)	8,8	
III. Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Konsumsi Ikan	-	Tidak ada alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran karena adanya refocusing anggaran
	7.	Kontribusi Ekspor Perikanan	-	
IV. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	8.	Nilai tukar nelayan (NTN)	107,89	
V. Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	9.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	0,28	
	10.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	50,60	



Berdasarkan pertimbangan disebutkan sebelumnya diatas, maka dilakukan penyesuaian rencana kerja tahun 2020 yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja.

*Tabel 6. Penetapan Kinerja / IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2020 (PK Perubahan)*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	KETERANGAN
I. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	1.	Nilai sakip OPD (%)	85,81	Revisi target nilai SAKIP berdasarkan capaian tahun 2019 yang telah melampaui target kinerja awal
	2.	Rata- rata capaian kinerja perangkat daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) (%)	95%	
	3.	% ASN Nilai SKP kategori baik (%)	83	
II. Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor perikanan	4.	Produksi perikanan (ton)	2.801.433,4	Proyeksi penurunan produksi akibat pandemi covid dan tidak dimasukkannya garam pada data produksi perikanan
	5.	Kontribusi PDRB Perikanan (%)	4,2	Proyeksi penurunan produksi akibat pandemi covid berdampak pada kontribusi PDRB
III. Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Konsumsi Ikan	-	Tidak ada alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran karena adanya refocusing anggaran
	7.	Kontribusi Ekspor Perikanan	-	
IV. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	8.	Nilai tukar nelayan (NTN)	100,58	Proyeksi penurunan target produksi akibat pandemi covid yang berdampak pada indeks yang diterima nelayan

*Tabel 6. Penetapan Kinerja / IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel  
TA. 2020 (PK Perubahan)*

V. Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	9.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	0,28	
	10.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	29,47	Terkait proyeksi penurunan produksi tangkap akibat pandemi covid sehingga dilakukan revisi target Proporsi tangkapan ikan

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
$\leq 50$ (Sangat Rendah / SR)
$50.1 \leq 65$ (Rendah / R )
$65.1 \leq 75$ (Sedang /S)
$75.1 \leq 90$ (Tinggi /T )
$90.1 \geq$ (Sangat tinggi /ST )

Sumber :Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian indikator sasaran menggunakan asumsi I : jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik** atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/jelek** adalah :

$$\% \text{pencapaianrencanatingkatcapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila **semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian sasaran kinerja **semakin rendah/jelek**, atau sebaliknya **realisasi semakin rendah** pencapaian kinerja **semakin baik** menggunakan rumus :

$$\% \text{pencapaianrencanatingkatcapaian} = \frac{(2 \times \text{rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

### 3.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN / IKU

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020.

Hasil pengukuran capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan pada table berikut :

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran /IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

Sasaran dan Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	1	Nilai Sakip OPD (%)	85,81	85,61*	99,77
	2	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	95,00	64,66	68,06
	3	ASN Nilai SKP Kategori Baik (%)	83,00	99,49	119,86
Sasaran II : Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor perikanan	4	Produksi perikanan (Ton)	2.801.433,4	4.101.242,6	146,39
	5	Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sul Sel (%)	4,2	8,5	202,38
Sasaran III : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,58	99,64	99,07
Sasaran IV : Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	7	Konsumsi Ikan	-	-	-
	8	Kontribusi Ekspor	-	-	-
Sasaran V : Meningkatnya kelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	9	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,28	2,33	832,14
	10	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	29,47	52,18	177,07
Rata-Rata Capaian					208,27

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Predikat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah indikator	Rata-Rata Capaian					Predikat
			≤ 50	50,1 ≤ 65	65,1 ≤ 75	75,1 ≤ 90	90,1 ≥	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	3					95,90	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor perikanan	2					174,39	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	1					99,07	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	2						-
5	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	2					465,33	Sangat Tinggi

### **3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Untuk memberikan informasi yang lebih transparan maka hasil pengukuran capaian kinerja selanjutnya dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab target yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak tercapai. Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2020 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penjelasan prestasi kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2019 sebagaimana berikut.



Terdapat 3 indikator dalam mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah yaitu (1) nilai SAKIP OPD, (2) rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan) dan (3) persentase ASN nilai SKP kategori baik.



## a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran I

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja Sasaran	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai sakip OPD	85,81	85,61*	99,77*
Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	95,00	64,66	68,06
% ASN nilai SKP kategori baik	83,00	99,49	119,87

Realisasi Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebesar 85,61 (data sementara) atau mencapai target sebesar 99,77 %. Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Kelautan dan perikanan tahun 2020 sebesar 64,66 % atau mencapai target sebesar 68,06%. Realisasi persen ASN nilai SKP kategori baik tahun 2020 sebesar 99,49 % atau mencapai 119,87 % dari target 83 %.

## b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 9. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran I dan capaian terhadap RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	2018	2019	2020*	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2020 terhadap 2023 (%)
Nilai sakip OPD	84,59	85,61	85,61	86,41	99,07

Tabel 9. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran I dan capaian terhadap RPJMD

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	79.29	135.25	64.66	95,00	68,06
% ASN nilai SKP kategori baik	99.51	99.49	99.49	86	115,68

Realisasi Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dan naik/turun ..... sebesar .... % dari nilai SAKIP tahun 2019. Realisasi persen ASN nilai SKP kategori baik tahun 2020 sama dengan realisasi tahun 2019 sebesar 99,48%. Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Kelautan dan perikanan tahun 2020 turun 52,19 % dari capaian rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) tahun 2019 sebesar 135,25 %.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Realisasi Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 mencapai 99,07 %. Realisasi persen ASN nilai SKP kategori baik tahun 2020 mencapai 115,68 %. Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Kelautan dan perikanan tahun 2020 mencapai 68,06 %.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran I serta alternative solusi yang telah dilakukan**

INDIKATOR 1.1	NILAI SAKIP OPD
---------------	-----------------

Realisasi Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebesar 85,61 (*data sementara*) atau mencapai target 105,86 % dan naik sebesar ..... % dari nilai SAKIP tahun 2019. Nilai SAKIP DKP provinsi Sulawesi Selatan selama 3 tahun berturut-turut mendapat predikat A (memuaskan), hal ini menunjukkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menuangkan program telah selaras dan mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD serta mampu meningkatkan pencapaian kinerja program dan kegiatan.

*Tabel 10. Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2020*

Komponen yang dinilai	Bobot (%)	2017	2018	2019	2020*	Naik/turun tahun 2019 - 2020
Pernyataan Kinerja	30	25,13	28,35	28,05		
Pengukuran Kinerja	25	19,69	19,69	20,31		
Pelaporan Kinerja	15	13,83	13,83	13,83		
Evaluasi Internal	20	7,18	7,18	6,95		
Pencapaian Kinerja	10	14,98	15,54	16,47		
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>80,82</b>	<b>84,59</b>	<b>85,61</b>		
<b>Kategori</b>		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>		

Jika dilihat dari nilai komponen, pada tahun 2019 terjadi penurunan pada komponen/sub komponen diantaranya komponen Perencanaan Kinerja yaitu dari nilai 28,35 menjadi 28,05. Dari hasil kertas kerja evaluasi AKIP oleh Inspektorat diperoleh subkomponen yang belum maksimal yaitu :

- sub komponen Implementasi Renstra dari point 3 dicapai 2,25 atau 2,25%
- Sub komponen implementasi perencanaan kinerja tahunan point 6 dicapai 4,8 atau 80 %

Untuk komponen evaluasi internal turun dari 7,18 menjadi 6,95. Sub komponen yang belum maksimal yaitu :

- Sub komponen Kualitas evaluasi dari point 5 dicapai 3,68 atau 73,67 %
- Sub komponen pemanfaatan evaluasi dari point 3 dicapai 1,5 atau 50 %

Hal ini perlu menjadi perhatian dan acuan untuk perbaikan tahun berikutnya. Untuk implementasi Renstra sebagai dokumen perencanaan harus menjadi acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran, monitoring pencapaian dan review secara berkala perlu dilakukan lebih baik lagi. Serta implementasi evaluasi internal yaitu hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan, perbaikan perencanaan dan tindak lanjut dalam bentuk perbaikan.

**INDIKATOR 1.2**

**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH  
(EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN)**

Realisasi rata-rata capaian kinerja Dinas Kelautan dan perikanan tahun 2020 sebesar 64,66 atau mencapai target sebesar 68,06% dan turun 52,19 % dibandingkan tahun 2019 sebesar 135,25 . Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 maka dicapai 68,06 % dari target RPJMD.

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah sebesar 64,66 % kategori rendah disebabkan Adanya kebijakan refocusing anggaran sehingga ada beberapa kegiatan fisik yang tidak dilaksanakan sehingga target indikator tidak tercapai, dan fokus pada kegiatan prioritas sehingga dari 8 program , 42 kegiatan, dan 75 indikator dalam dokumen perencanaan Renstra teralokasi di DPA tahun 2020 adalah 6 program, 25 kegiatan dan 31 indikator.

**INDIKATOR 1.3****PERSEN ASN NILAI SKP KATEGORI BAIK**

Realisasi persen ASN nilai SKP kategori baik tahun 2020 sebesar 99,49 % atau mencapai target sebesar 119,86 % dari target 83 %. Capaian ASN bernilai kategori baik tahun 2020 relatif sama dengan tahun 2019 yaitu jumlah pegawai yang indisipliner sebanyak 1 orang . Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 maka telah dicapai 115,69 % dari target atau telah melampaui target RPJMD.

Tahun 2018 – 2019 persentase ASN dengan nilai SKP kategori baik tidak mencapai 100% karena terdapat satu orang ASN indisipliner disebabkan tidak membuat SKP 2 tahun berturut-turut. Tahun 2020 terdapat satu orang pegawai yang tidak disiplin masuk kantor. Tindak lanjut yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak inspektorat untuk dilakukan penanganan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 11. Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik

Tahun	Jumlah Total Pegawai (orang)	Pegawai Indisipliner (orang)	% ASN SKP kategori baik = Jumlah ASN SKP kategori baik/Jumlah Total ASN
2018	203	1	99,51
2019	196	1	99,48
2020	195	1	99,49

## d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran I

Tabel 12. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Sasaran I

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4 = (2 - 3)
Nilai sakip OPD	105,86	90,03	0,3 (efisien)
Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	64,66		
% ASN nilai SKP kategori baik	99,49		
Rata – Rata Capaian Kinerja	90,33		

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana.

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran I**

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dapat dicapai melalui program :

❖ **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pelaksanaan program ini adalah terlayannya kebutuhan kantor (listrik, air dan internet) selama 12 bulan , terbayarnya pajak kendaraan roda 4 sebanyak 24 unit roda 2 sebanyak 24 unit, tersedianya Alat tulis kantor cetak dan penggandaan unit kerja, tersedianya makan minum rapat 2 jenis, terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.



*Gambar 2. kegiatan rapat dan koordinasi dalam program pelayanan administrasi perkantoran*

❖ **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pelaksanaan program ini adalah pemeliharaan rutin kantor yaitu rumah dinas 1 unit, kantor dinas 1 unit, pengadaan ac dan perlengkapannya 8 unit

serta bahan pembersih dan peralatan kebersihan, pemeliharaan rutin berkala dan penggantian suku cadang kendaraan jabatan /dinas sebanyak 33 unit.



*Gambar 3. kegiatan dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan perlengkapan kantor*

❖ **Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**

Pelaksanaan dari program ini adalah tersusunnya Dokumen RKA dan DPA Pokok dan Perubahan 4 dokumen, Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan 2 dokumen, dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun sebanyak 4 dokumen, laporan data dan informasi sebanyak 2 dokumen, laporan administrasi keuangan sebanyak 6 laporan.

❖ **Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

Hasil dari pelaksanaan dari program ini tersusunnya administrasi kepegawaian 1 dokumen.

**f. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut**

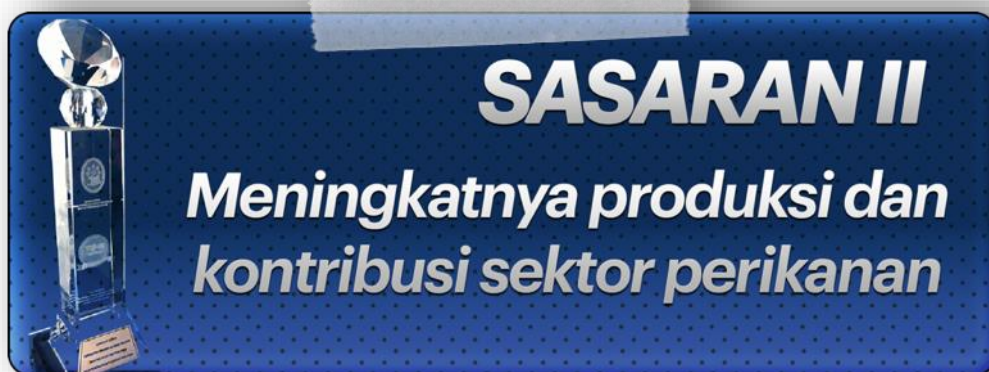
Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program /kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diantaranya adalah



- Sarana dan prasarana belum memadai khususnya di Kantor Cabang Dinas (KCD) dan UPT
- Pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik terdapat banyak sisa anggaran sehingga serapan anggaran tidak maksimal

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

- Dukungan alokasi anggaran penyediaan sarana prasarana kebutuhan kantor.
- Lebih cermat dalam perencanaan penganggaran untuk anggaran kegiatan rutin.



Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya produksi dan kontribusi sektor perikanan diukur dengan 2 indikator yaitu : (1) produksi perikanan, (2) kontribusi PDRB perikanan.

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran II**

*Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran II*

<i>Indikator Kinerja Sasaran</i>	<i>2020</i>		
	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>
Produksi Perikanan (Ton)	2.801.433,10	4.101.242,6	146,4
Kontribusi PDRB Perikanan (%)	4,2	8.5	202,38

Realisasi Produksi perikanan mencapai target sebesar 146,4 % yaitu terealisasi 4.101.242,6 ton (*data sementara*) dari target 2.801.433,10 ton. Realisasi kontribusi PDRB sub sektor perikanan pada tahun 2020 sebesar 8,5% atau mencapai target sebesar 202,38 %.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)**

*Tabel 14. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran II dan capaian terhadap RPJMD*

<i>Indikator Kinerja Sasaran</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Target Akhir RPJMD 2023</i>	<i>Capaian 2019 terhadap 2023 (%)</i>
Produksi Perikanan (Ton)	3.941.648,8	4.262.553,5	3.935.493,3	4.061.326,6	4.101.242,6	4.249.058,20	96,52
Kontribusi PDRB Perikanan (%)	8,2	8,3	8,4	8,4	8,5	5,6	151,80

Selama kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, produksi perikanan berfluktuasi dengan peningkatan rata-rata 1,16 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka produksi perikanan mencapai 96,52 %. Kontribusi PDRB Perikanan meningkat 1,2 % dibandingkan tahun 2019 dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah dicapai 151,80 % dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran II serta alternative solusi yang telah dilakukan

## INDIKATOR 2.1

## PRODUKSI PERIKANAN

Data produksi perikanan diperoleh dengan rumus :

$$\text{Produksi Perikanan} = \text{Prod.Kab/Kota I} + \text{Prod.Kab/Kota II} + \text{Prod.Kab/Kota III} + \dots \text{dst}$$

$$X_{\text{tot}} = X_1 + X_2 + X_3 + \dots$$

Terkait kondisi pandemi covid dilakukan revisi target produksi yang semula 5.558.740,8 ton direvisi menjadi 2.801.433,1 ton. Berdasarkan tabel 13, produksi perikanan (*data sementara*) mencapai target sebesar 146,40 %, dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 produksi perikanan naik sebesar 1 %. Selama kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, produksi perikanan berfluktuasi dengan peningkatan rata-rata 1,16 %. Tingginya capaian produksi terhadap target menunjukkan bahwa kondisi pandemi tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas produksi khususnya budidaya.

Tabel 15. Realisasi produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Peningkatan rata-rata (2016-2019)
Volume produksi perikanan tangkap (ton)	312.380,8	359.770,1	366.540,7	398.565,2	388.130,8	5,79
Volume produksi perikanan budidaya (ton)	3.629.268,0	3.902.783,4	3.568.952,6	3.662.761,4	3.713.111,8	0,75
Total Produksi	3.941.648,8	4.262.553,5	3.935.493,3	4.061.326,6	4.101.242,6	1,16

Perlambatan peningkatan produksi perikanan dipengaruhi penurunan produksi perikanan tangkap sebesar 2,6 % yaitu 398.565,2 tahun 2019 menjadi 388.130,8 ton tahun 2020 (data sementara). Akibat pandemi covid 19 nelayan mengurangi waktu melaut karena harga ikan yang turun seiring permintaan yang turun, serta faktor cuaca yang tidak menentu menyebabkan nelayan tidak melaut. Selama kurun waktu 2016 – 2020 peningkatan rata-rata produksi perikanan tangkap adalah 5,79 %. Upaya yang terus dilakukan adalah penyediaan sarana prasarana nelayan berupa bantuan mesin, alat tangkap dan alat bantu tangkap. Diharapkan dapat menjadi stimulus pemulihan dampak pandemi sehingga nelayan dapat terus menjalankan dan mempertahankan usahanya.

*Tabel 16. Perkembangan produksi komoditi unggulan tahun 2016 -2020*

KOMODITI	Realisasi tahun-n					naik/ (turun)	Kenaikan rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020		
RUMPUT LAUT	3,409,048.2	3,671,538.80	3,317,524.90	3,406,924.6	3,441.138,7	1,0	0.44
UDANG	41,686.0	41,686.0	46,524.0	44,520.5	50.876,1	14,3	5,39
UDANG WINDU	14,776.7	12,046.2	10,169.5	10,370.2	10.595,4	2,2	(7,48)

Produksi budidaya mengalami peningkatan 1,4 % dari tahun 2019 sebesar 3.662.761,4 ton menjadi 3.713.111,8 ton di tahun 2020 dengan peningkatan rata-rata selama kurun waktu tahun 2016 – 2020 adalah 0,75 %. Produksi komoditi budidaya yang mengalami kenaikan yaitu rumput laut naik sebesar 1,0 dibandingkan produksi rumput laut di tahun 2019 dengan peningkatan rata-rata 0,44 %. Masalah yang masih terus dijumpai adalah masih banyaknya pembudidaya

rumput laut menggunakan bibit dari hasil pengembangan vegetatif dengan cara menyisihkan thalus dari hasil budidaya sehingga hasil produksi menjadi kurang optimal. Oleh karenanya diperlukan upaya pengembangan kebun bibit rumput laut hasil kultur jaringan di daerah. Memperkuat koordinasi dengan penyuluh mendorong petani rumput laut untuk beralih dari bibit konvensional ke bibit kultur jaringan dari kebun bibit rumput laut setempat. Tahun 2019 Sulawesi Selatan merupakan Penghasil rumput laut terbesar nomor 1 nasional, untuk tahun 2020 data belum tersedia.

Komoditi unggulan budidaya yaitu rumput laut dan udang khususnya udang windu sebagaimana terlihat pada table 16. Untuk komoditi unggulan udang mengalami kenaikan 14,3 % dari tahun sebelumnya dengan peningkatan rata-rata 5,39 %. Khusus untuk udang windu terjadi peningkatan produksi sebesar 2,2 % di tahun 2020. Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan udang windu melalui kegiatan diseminasi inovasi teknologi budidaya udang windu berbasis kawasan (sitto bangkit) dilakukan diseminasi atau edukasi kepada para pelaku pembudidaya udang khususnya windu agar paham dan mau melakukan budidaya di tambak ramah lingkungan. Budidaya ini dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan yakni penggunaan probiotik untuk memperbaiki kondisi tanah tambak dan memberikan/menambah kesuburan tambak.

Permasalahan yang dihadapi adalah 1) ketersediaan induk unggul dan benih berkualitas 2) Kurang maksimalnya suplai air laut masuk dan keluar pertambakan karena fungsi saluran yang menurun akibat pendangkalan di muara sungai, 3) menurunnya kualitas lingkungan perairan. Oleh karenanya upaya yang akan dilakukan adalah (1) memperkuat keberadaan broodstock center (jaringan perbenihan dan pemuliaan penyangga pasokan induk) di setiap daerah yang potensial untuk menjadi penyangga stock suplai induk unggul UPT untuk menghasilkan benih

unggul (2) Berkoordinasi dengan Pemda TK II terkait revitalisasi tambak di berbagai wilayah dengan tujuan edukasi budidaya yang baik sesuai aturan CBIB (3) Budidaya udang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menjaga kualitas lingkungan diantaranya dengan penanaman mangrove. Pada tahun 2019 Sulawesi Selatan Penghasil udang urutan ke 7 nasional, untuk tahun 2020 data belum tersedia. Diperlukan upaya untuk pemulihan pasca pandemi bagi nelayan dan pembudidaya berupa program kegiatan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid.

#### INDIKATOR 2.2

#### KONTRIBUSI PDRB PERIKANAN

Data kontribusi PDRB perikanan diperoleh dari Data Badan Pusat Statistik. Rumus penghitungan kontribusi PDRB Perikanan adalah:

$$\text{kontribusi PDRB perikanan} = \frac{\text{Nilai PDRB sektor perikanan}}{\text{Jumlah nilai PDRB Sulawesi Selatan}} \times 100\%$$

Terkait kondisi pandemi covid dilakukan revisi target kontribusi PDRB Perikanan yang semula 8,8 % direvisi menjadi 4,2 %. Realisasi kontribusi PDRB sub sektor perikanan pada tahun 2020 sebesar 8,5% atau mencapai target sebesar 202,38 % dan meningkat 1,2 % dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 8,4 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah dicapai 151,79 % dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Tingginya capaian menunjukkan bahwa proyeksi target bahwa pandemi akan berpengaruh pada penurunan produksi ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas produksi khususnya pembudidaya, namun hanya berdampak pada pemasaran yang berimbas pada nilai produksi produk kelautan perikanan sebagaimana tabel perkembangan nilai produksi dibawah.

Penurunan nilai produksi tangkap seiring dengan penurunan volume produksi akibat turunnya permintaan pasokan sehingga berpengaruh pula pada nilai produksi. Untuk nilai produksi budidaya dipengaruhi oleh harga rumput laut yang turun akibat kondisi pandemic yang melanda berbagai wilayah termasuk negara tujuan ekspor sehingga permintaan pasokan menurun dan berimbas pula pada harga atau nilai produksi. Upaya yang akan dilakukan yaitu melaksanakan program kegiatan pembinaan nelayan dan pembudidaya dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid sehingga dapat terus menjalankan dan mempertahankan usahanya.

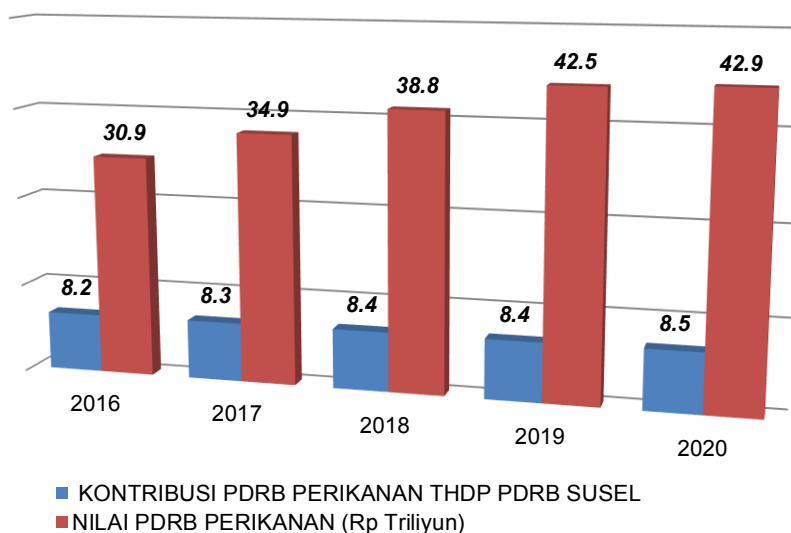
Tabel 16. Perkembangan nilai produksi perikanan tahun 2018 -2020

Tahun	2018	2019	2020	naik/turun 2019- 2020
Total Nilai Produksi (Rp M)	21,716.70	23,592.85	22,428.06	(4.94)
Nilai Produksi Tangkap (Rp M)	7,987.20	8,631.30	8,626.62	(0.05)
Nilai Produksi Budidaya (Rp M)	13,729.50	14,856.30	13,785.50	(7.21)
Nilai produksi garam (Rp M)	65.03	105.25	15.94	(84.86)

Seiring dengan peningkatan kontribusi PDRB, nilai PDRB perikanan pun meningkat 0,9 % yaitu 42,5 Trilyun pada tahun 2019 menjadi 42,9 Trilyun pada tahun 2020.



Grafik 4. Perkembangan Kontribusi PDRB Perikanan Terhadap PDRB Sul Sel tahun 2014 -- 2019



Peningkatan kontribusi PDRB sub sektor perikanan didukung oleh peningkatan nilai produksi komoditi unggulan yaitu udang meningkat 7,5 % dan bandeng 4,6 %.

**d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran II**

Tabel 17. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran II

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
Produksi Perikanan (Ton)	146,40	75,52	98,87
Kontribusi PDRB Perikanan (%)	202,38		
Rata-Rata Capaian Kinerja	174,39		

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi dan kontribusi sektor perikanan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada presentase realisasi penggunaan dana.

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sasaran II**

Sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi dapat dicapai melalui program :

**❖ Program hilirisasi perikanan dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung yaitu:**

- Desiminasi Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan (sitto bangkit) yang dilaksanakan untuk menghasilkan inovasi teknologi budidaya udang windu (percontohan budidaya udang) sebanyak 100 unit yang tersebar di 10 kabupaten /kota yakni Kabupaten Maros, Pangkep, Bone, Pinrang , Takalar, Bulukumba, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara dan Permasalahan budidaya udang windu di masyarakat yaitu benur pada tahap penggelondongan terkadang Cuma mampu hidup sekitar 3 (tiga) hari, Survival Rate ditambah pembesaran sekitar 15-25 %, pertumbuhan lambat dan serangan WSSV masing sering terjadi. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pembinaan dan penyuluhan kepada POKDAKAN, revitalisasi tambak di berbagai wilayah dilakukan dengan tujuan edukasi budidaya udang yang baik sesuai dengan aturan CBIB (koordinasi dengan Pemda TK II karena sudah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota). Tingginya resiko budidadaud udan windu menyebabkan penurunan produksi udang windu di beberapa

kabupaten/kota disebabkan pembudidaya lebih memilih membudidayakan vannamei karena tahan penyakit, waktu budidaya lebih cepat dan budidayanya lebih mudah.



*Gambar 3. Percontohan Budidaya Udang Windu di Kabupaten Pinrang*

*Tabel 18. Perkembangan produksi udang windu per kab/kota tahun 2018 -2020*

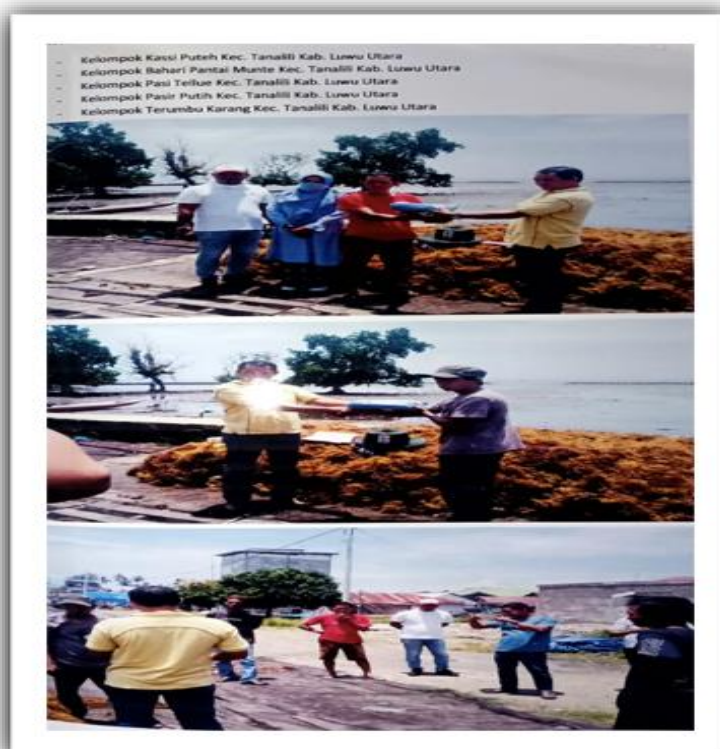
NO	KABUPATEN	PRDOKSI UDANG WINDU TAHUN – n		
		2020	2019	2018
1	Luwu	436,8	488.0	515.1
2	Luwu Utara	526,2	568.1	510.3
3	Wajo	97,1	96.3	94.8
4	Bone	897,8	877.2	843.2
5	Sinjai	62,0	63.5	8.1
6	Bulukumba	499,1	554.6	657.9
7	Selayar	9,6	9.1	7.8
8	Bantaeng	4,9	7.4	5.9
9	Jeneponto	316,9	407.0	406.5
10	Takalar	218,4	217.2	312.0
11	Makassar	319,7	367.0	272.6
12	Maros	1.820,5	1,772.6	1,749.5
13	Pangkep	1.046,0	1,129.0	1,183.0
14	Barru	49,0	122.0	120.0
15	Pare-Pare	-	-	-
16	Pinrang	3.621,9	3,057.4	2,874.6
17	Gowa	48,5	69.4	71.6
18	Luwu Timur	560,5	556.7	529.0
19	Palopo	7,2	7.9	7.5
TOTAL		10.542,2	10,370.2	10,169.5

- Inovasi teknologi usaha perikanan budidaya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas perikanan lainnya untuk menghasilkan inovasi teknologi kebun bibit rumput laut (percontohan kebun bibit rumput laut hasil kultur jaringan) sebanyak 465 masing-masing di Kabupen Wajo, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kota Makassar, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Bantaeng. Produksi rumputlaut per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah.

*Tabel 19. Perkembangan produksi rumput laut per kab/kota tahun 2018 -2020*

NO	Kabupaten	RUMPUT LAUT		
		Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Luwu	612.532,2	604.420,76	598.037.33
2	Luwu Utara	213.848,7	206.618,48	196.988.64
3	Wajo	476.078,9	476.055,25	462.474.73
4	Bone	286.767,2	291.686,60	275.627
5	Sinjai	45.976,4	47.733,99	40.775.81
6	Bulukumba	192.250,4	177.351,10	178.848.4
7	Selayar	642,1	395,74	365.5
8	Bantaeng	66.419,0	84.805,21	84.076.788
9	Jeneponto	231.754,4	165,036.22	193.517.76
10	Takalar	409.117,3	466,014.05	538.680.37
11	Maros	12.360,5	12,475.00	13.240.8
12	Pangkep	420.952,0	445,608.00	314.201.3

13	Barru	680	1,114.00	959
14	Pinrang	14.243,7	16,266.30	15.448.8
15	Luwu Timur	298.712,0	299,067.50	294.897
16	Palopo	123.732,4	112,276.43	109.385.91
TOTAL		3.406.169,2	3,406,924.64	3,317,525.14



Gambar 5. Bantuan sarana prasarana percontohan kebun rumput laut kepada kelompok pembudidaya

- Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPT Provinsi) DAK yang dilaksanakan untuk peningkatan dan pengembangan fungsi pelabuhan perikanan.

*Tabel 20. Daftar pelabuhan dan alokasi pembangunan Sarana dan Prasarana tahun 2019-tahun 2020*

No	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	LOKASI			
		KAB./KOTA	KECAMATAN	KEL. / DESA	
1	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	Ujung Tanah	Kel. Gusung	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
2	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Maros	Bontobahari	Kel. Bontoa	TIDAK OPERASIONAL
3	Pelabuhan Perikanan Labuang	Kab. Maros	Turikale	Kel. Pettuadde	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
4	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep	Labakkang	Kel. Maccini Baji	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
5	Pelabuhan Perikanan Polejiwa	Kab. Barru	Tanete Rilau	Desa Tellumpanua	TIDAK OPERASIONAL
6	Pelabuhan Perikanan Sumpang Binangae	Kab. Barru	Barru	Kel. Sumpang Binangae	
7	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Parepare	Sumpang Binangae	Kel. Cempae	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
8	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	Tanete Riattang Timur	Kel. Lonrae	Jalan Kompleks PPI Lonrae 312.5 Meter (2020)
9	Pelabuhan Perikanan Bonepute	Kab. Luwu	Bonepute	Kel. Bonepute	
10	Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo	Kab. Luwu	Belopa	Desa Belopa	

11	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	Bua	Desa Raja	
12	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	Wara Timur	Kel. Pontap	Pengadaan air bersih (2019)
13	Pelabuhan Perikanan Malili	Kab. Luwu Timur	Malili	Desa Wewangriu	
14	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	Sinjai Utara	Kel. Lappa	
15	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	Kajang	Ds. Tana jaya	Rehabilitasi pelataran PPI Kajang (2019), Jaringan listrik PPI Kajang (2020), Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
16	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	Bontobahari	Desa Tana Lemo	jaringan instalasi listrik PPI Bontobahari (2019), Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
17	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng	Pa'jukukang	Desa Pa'jukukang	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
18	Pelabuhan Perikanan Tanrusampe	Kab. Jeneponto	Binamu	Kel. Pabiringa	
19	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	Galesong Utara	Desa Beba	
20	Pelabuhan Perikanan Benteng Somba Opu	Kab. Gowa	Barombong	Kel. Somba Opu	
21	Pelabuhan Perikanan Lero	Kab. Pinrang	Suppa	Kel. Lero	TIDAK OPERASIONAL
22	Pelabuhan Perikanan Bonehalang	Kab. Kep. Selayar	Benteng	Kel. Benteng Selatan	



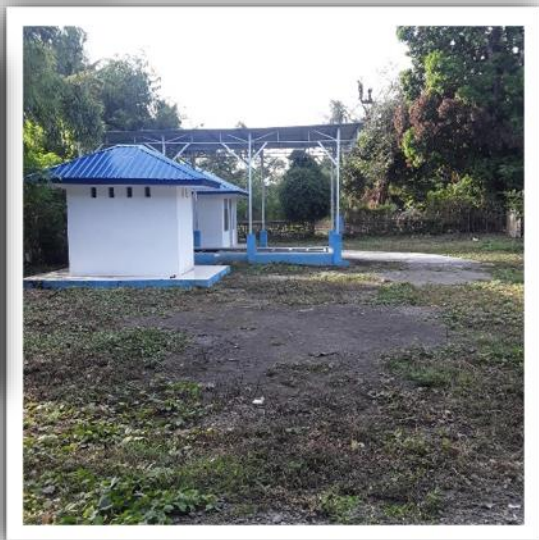
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Garam (DAK) dilaksanakan revitalisasi gudang garam rakyat < 100 ton di Kecamatan Bangkala jenepono. pembangunan gudang garam diharapkan dapat menampung produksi garam dari petani untuk menjaga stabilitas harga garam.



*Gambar 9. Revitalisasi Gudang Garam dibawah 100 ton di Kabupaten Jeneponto tahun 2020*



*Gambar 10. Gudang Garam kapasitas 1.000 ton dilengkapi Coveyor di Kab.Takalar tahun 2019*



- Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kapasitas Nelayan dilaksanakan bantuan sarana untuk nelayan berupa mesin 19 unit, alat tangkap 48 paket, dan alat bantu tangkap 35 paket.
- Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan konsumsi dan non konsumsi sebanyak 5 produk perikanan serta untuk mendukung operasional UPT BPMPP berupa pembelian bahan kimia, serta sertifikasi untuk akreditasi Surveilance ISO/IEC.

**f. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut**

Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- ❖ Pengembangan udang windu ditemukan permasalahan ketersediaan induk unggul dan benih berkualitas 2) Kurang maksimalnya suplai air laut masuk dan keluar pertambakan karena fungsi saluran yang menurun akibat pendangkalan di muara sungai, 3) menurunnya kualitas lingkungan perairan.
- ❖ Mayoritas pembudidaya rumput laut menggunakan bibit dari hasil pengembangan vegetatif dengan cara menyisihkan thalus dari hasil budidaya secara berulang sehingga hasil produksi menjadi kurang optimal.
- ❖ Kendala pengembangan pelabuhan diantaranya keterbatasan SDM yang terlatih, keterbatasan biaya untuk melengkapi fasilitas operasional pelabuhan. Selain itu, pelabuhan yang diserahkan oleh Kab/Kota tidak dilengkapi dengan standar perencanaan yang baik seperti studi kelayakan dan master plan karena dibuat sesuai dengan ketersediaan anggaran di kabupaten saat itu.

- ❖ Penurunan produksi garam karena harga yang rendah di tingkat petani yaitu Rp 500 /kg serta faktor cuaca yang tidak mendukung membuat nelayan enggan melakukan aktivitas produksi

Tindak Lanjut yang akan dilakukan adalah :

- ❖ Perlunya memperkuat keberadaan broodstock center ( jaringan perbenihan dan pemuliaan penyangga pasokan induk) disetiap daerah yang potensial untuk menjadi penyangga stock suplai induk unggul UPT untuk menghasilkan benih unggul (2) Berkoordinasi dengan Pemda TK II terkait revitalisasi tambak di berbagai wilayah dengan tujuan edukasi budidaya yang baik sesuai aturan CBIB (3) Budidaya udang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menjaga kualitas lingkungan diantaranya dengan penanaman mangrove.
- ❖ Pengembangan kebun bibit rumput laut hasil kultur jaringan di daerah. Memperkuat koordinasi dengan penyuluh mendorong petani rumput laut untuk beralih dari bibit konvensional ke bibit kultur jaringan dari kebun bibit rumput laut setempat.
- ❖ Perlu pelatihan petugas yang ditempatkan di pelabuhan, melengkapi dan memprioritaskan fasilitas operasional pokok pelabuhan seperti SPDN , pabrik es dan air bersih. Perlu dilakukan review desain dan mengkaji kembali master plan pelabuhan untuk pengembangan pelabuhan yang maksimal.



Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan diukur dengan 2 indikator yaitu : (1) konsumsi ikan (2) kontribusi ekspor perikanan. **Pada tahun 2020 sasaran ini tidak mendapatkan alokasi anggaran karena adanya refocusing anggaran namun tetap dijelaskan dalam dokumen LKIP sebagai bahan informasi capaian indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan.**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran III**

*Tabel 21. Capaian Kinerja indikator sasaran III Tahun 2020*

Indikator Kinerja Sasaran	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Konsumsi ikan (kg/kap/tahun )	58,16	63,02	108,36
Kontribusi ekspor perikanan (%)	5,92	7,49	126,47

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran III tahun ini dengan tahun sebelumnya target jangka menengah (RPJMD)**

*Tabel 22. Perkembangan Capaian Kinerja indikator sasaran III dan Capaian terhadap target RPJMD*

Indikator Kinerja Sasaran	2017	2018	2019	2020	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian terhadap 2023 (%)
Konsumsi (kg/kap/tahun)	55,2	56,3	64,7	63,02	65,9	98,01
Kontribusi ekspor perikanan (%)	10,30	6,28	8,08	7,49	6,85	109,34

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran I serta alternative solusi yang telah dilakukan**

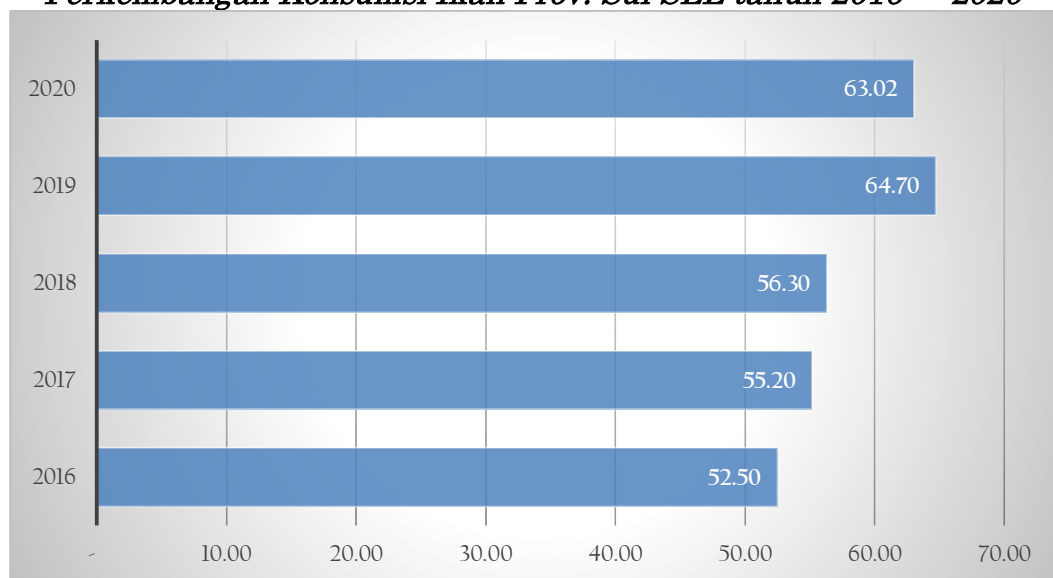
**INDIKATOR 3.1 KONSUMSI IKAN**

Cara untuk mengukur capaian konsumsi ikan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Konsumsi Ikan} = \frac{(\text{total produksi} - \text{produksi bukan bahan makanan}) - \text{ekspor} - 15\%}{(\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun} / 2)}$$

Keterangan : 15% adalah data produkdiantarpulau yang takterhitung (range 0 – 15 %)

*Grafik 4.*  
**Perkembangan Konsumsi Ikan Prov. Sul SEL tahun 2016 -- 2020**



Berdasarkan grafik diatas terlihat angka konsumsi ikan pada tahun 2020 sebesar 63,02 kg/kap/th atau mencapai 108,36 % dari target 58,16 kg/kap/thn. Capaian ini turun 2,6 % dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 64,70 kg/kap/tahun. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah dicapai 98,01 % dan telah melampaui target nasional sebesar 111,76 % dari target nasional sebesar 56,39 kg /kap/tahun. Penurunan konsumsi ikan mengalami penurunan seiring dengan penurunan produksi perikanan khususnya perikanan tangkap. Tingginya angka konsumsi ikan karena Sulawesi Selatan memiliki masyarakat yang mengkonsumsi ikan cukup tinggi dan memiliki budaya makan ikan yang tinggi serta pencapaian dari perikanan tangkap dan budidaya yang cukup mendukung.

**INDIKATOR 3.2 KONTRIBUSI EKSPOR PERIKANAN**

Data kontribusi ekspor perikanan diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Ekspor Perikanan} = \frac{\text{Jumlah ekspor hasil perikanan}}{\text{Total ekspor daerah}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2020 realisasi kontribusi ekspor perikanan sebesar 7,49 % atau mencapai 126,47 % dari target tahun 2020 sebesar 5,92%. Capaian ini turun 7,4 % dibandingkan tahun 2019 dimana kontribusi ekspor perikanan sebesar 8,08%.

*Tabel 23. Realisasi Ekspor Tahun 2017 - 2019*

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun-n			
	2017	2018	2019	2020
Volume Ekspor perikanan (Ton)*	126.244,3	130.623,1	166.373,2	158.416,50
Nilai Ekspor Perikanan US \$ (1000)*	251.777,9	340.390,4	355.301,7	339.002,90
Volume Ekspor sulsei (Ton)**	1.225.295,2	2.081.510	2.058.580	2.115.910
Nilai Ekspor Sulsei US \$ **	1.020.800.000	1.164.350.000	1.213.620.000	1.199.360.000
<b>Kontribusi ekspor perikanan (%)</b>	10,30	6,28	8,08	7,49

Sumber : \*) BKIPM Sul Sel ; \*\*) BPS Sulsei

Jika dilihat dari kurun waktu 2017 – 2019 kontribusi perikanan berfluktuasi. Volume ekspor perikanan terdiri dari rumput laut, udang, tuna cakalang tongkol (TCT), dan ikan lainnya (sirup ikan hiu, kakap kerapu, gurita , sotong ,cumi , telur ikan terbang dll). Tahun 2019 beberapa komoditi ekspor mengalami penurunan. Kondisi pandemi dan kebijakan lockdown berdampak pada penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor.

*Tabel 24. Volume ekspor komoditi unggulan perikanan*

Jenis Komoditi	Volume Ekspor tahun - n					Naik/turun tahun 2019-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	
-Rumput laut	105,127.1	102,121.0	105,760.0	140,420.1	134,818.7	-4,0 %
-Udang	6,884.5	5,316.0	4,462.0	7,098.1	8,107.4	14,2 %
-Tuna cakalang tongkol (TCT)	2,373.4	2,243.0	2,455.0	2,915.4	2,474.6	- 15,1 %
Ikan lainnya	3,871.2	16,565.0	17,946.0	15,939.6	12,578.5	- 21, 1
<b>TOTAL</b>	<b>118,256.3</b>	<b>126,245.0</b>	<b>130,623.0</b>	<b>166,373.2</b>	<b>158,416.5</b>	<b>-4,8</b>

**d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran III;**

*Tabel 25. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Sasaran III*

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4 = ( 2 – 3)
Konsumsi (kg/kap/tahun )	108,36	-	-
Kontribusi ekspor perikanan (%)	126,47		
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>	<b>117,42</b>		



Tidak dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran III.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran III

Tidak dilakukan analisis program/kegiatan karena tidak ada alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran III.



Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan diukur dengan satu indikator yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN).

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran IV**

*Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV*

Indikator Kinerja Sasaran	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Tukar Nelayan	100,58	99,64	99,07

Realisasi NTN tahun 2020 adalah 99,64 atau mencapai 99,07 % dari target yang 100,58.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran IV tahun ini dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)**

*Tabel 27. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV dan capaian terhadap RPJMD*

Indikator Kinerja Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2020 terhadap 2023 (%)
Nilai Tukar Nelayan	103,5	107,6	107,8	107,60	99,64	108,22	92,01

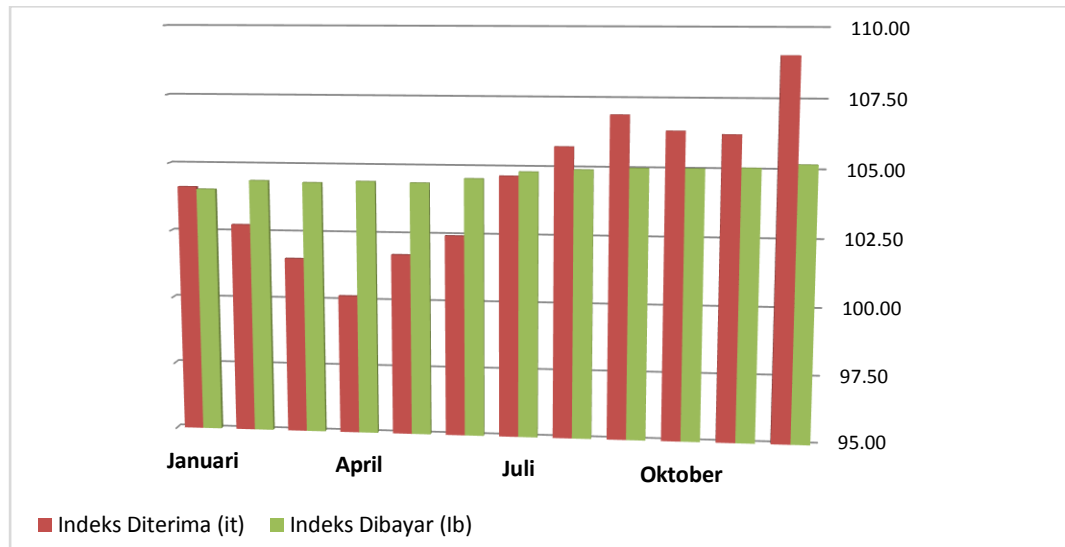
Realisasi NTN tahun 2020 sebesar 99,64 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 107,6, nilai tukar nelayan mengalami penurunan sebesar 7,40 %. Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD tahun 2023 sebesar 108,22 maka telah dicapai 99,4%

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran I serta alternative solusi yang telah dilakukan**

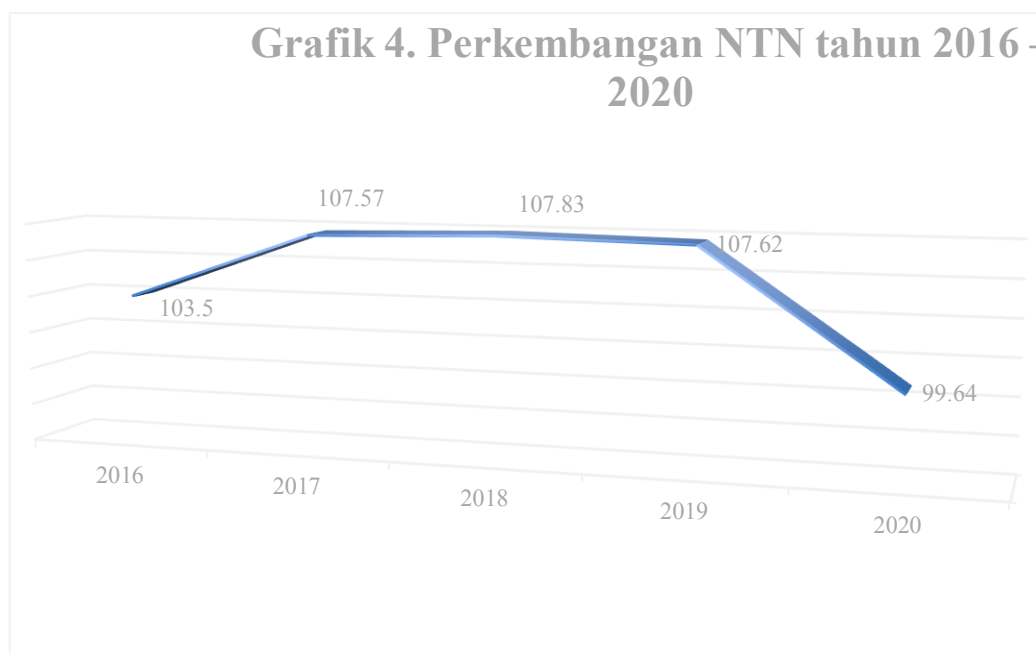
**INDIKATOR 4.1**

**NILAI TUKAR NELAYAN**

Terkait kondisi pandemi covid dilakukan revisi target NTN yang semula 108,6 direvisi menjadi 100,58. Realisasi NTN tahun 2020 adalah 99,63 atau mencapai 99,07 % dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 107,6 maka nilai tukar nelayan mengalami penurunan sebesar 7,40 %. Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD tahun 2023 sebesar 103,63 maka telah dicapai 96,15% dari target sehingga diharapkan target akhir RPJMD dapat tercapai.



Berdasarkan grafik 3, Indeks yang diterima (*it*) nelayan lebih kecil dibanding indeks yang harus dibayar (*ib*) oleh nelayan pada tahun 2020 khususnya dibulan Februari – Juni. Hal ini berkaitan dengan kondisi pandemi yang membatasi aktivitas masyarakat dengan diberlakukannya lockdown di berbagai negara dan PSBB di beberapa daerah sehingga berdampak pada menurunnya permintaan pasokan ikan hasil tangkapan. Hal ini tentunya berdampak pada pendapatan nelayan.



**d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran IV**

*Tabel 28. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya sasaran IV*

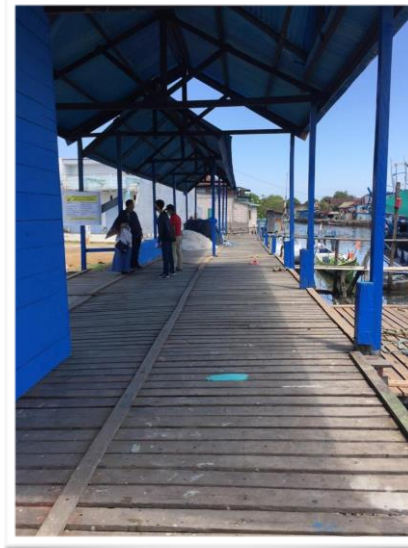
Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
1	2	3	4 = (2 -3)
Nilai TukarNelayan (%)	99,64	88,24	11,40

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana.

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sasaran IV**

Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat dicapai melalui program sebagai berikut :

- ❖ Program pengawasan , konservasi , penataan dan rehabilitasi pesisir dan Laut melalui kegiatan:
  - Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil & Prasarana di Pulau-Pulau Kecil (DAK) hasilnya berupa tersedianya dokumen perencanaan tambatan perahu di Pulau Gondong Bali Kab. Pangkep dan Perencanaan tambat perahu di Pulau kecil Kec. Bara Kota Palopo. Tahun 2020 tidak terdapat alokasi anggaran fisik pembangunan tambatan perahu disebabkan adanya refocusing anggaran DAK.
  - Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan pemanfaatan ekosistem perikanan berupa rehabilitasi tambatan perahu di Kabupaten Maros.



*Gambar Rehabilitasi Tambatan Perahu di Kab. Maros*

**f. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut**

**Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program dan kegiatan adalah :**

- ❖ Adanya refocusing anggaran DAK, sehingga anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana di pesisir tahun 2020 tidak terlaksana di beberapa lokasi.

**Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :**

- ❖ Mengalokasikan kembali (realokasi) anggaran DAK pada tahun 2021 untuk penyediaan sarana dan prasarana di pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan diukur dengan 2 indikator yaitu : (1) rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial, (2) proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran V**

*Tabel 29.. Capaian indikator Kinerja Sasaran V*

<i>Indikator Kinerja Sasaran</i>	<i>2020</i>		
	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>
Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	0.28	2,33	832,14
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	29.47	52,18	177,07

Tahun 2020 target rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial adalah 0,28% dapat direalisasikan sebesar 1.002.018,20 atau



2,33 % atau mencapai 832,14 % dari target. Realisasi proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman adalah 52,18 % atau mencapai 177,07 % dari target 29,47 %

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran I tahun ini dengan tahun sebelumnya target jangka menengah (RPJMD)**

*Tabel 30. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran V dan Capaian terhadap RPJMD*

<i>Indikator Kinerja Sasaran</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Target Akhir RPJMD 2023</i>	<i>Capaian 2019 terhadap 2023 (%)</i>
Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	0,22	0,22	2,32	2,32	2,33	1,01	230,69
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	42,0	48,4	48,92	53,59	52,18	38,80	134,49

Realisasi rasio kawasan lindung perairan meningkat dari tahun ke tahun yaitu 0,22 menjadi 2,33 tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pelimpahan kewenangan berdasarkan UU 23 tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target akhir akhir RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 sebesar 1,01 maka telah dicapai 230,69 % atau telah melampaui target akhir RPJMD. Realisasi proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman mengalami penurunan sebesar 2,63 % dari tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka telah dicapai 134,49 % .

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran V serta alternative solusi yang telah dilakukan

INDIKATOR 5.I

RASIO KAWASAN LINDUNG PERAIRAN TERHADAP TOTAL LUAS PERAIRAN TERITORIAL

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 7 kawasan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 31. Luas Kawasan Konservasi perairan daerah yang dikelola

No	NAMA KAWASAN	WILAYAH ADMINISTRASI	SK PENCADANGAN	JENIS KAWASAN	TOTAL LUAS	KETERANGAN
1	Kawasan Konservasi Perairan daerah (KKPD) Pulo Pasi Gusung	Kabupaten Kep. Selayar	Pergub Sul Sel no 3173/XII/2018	Taman wisata perairan dan laut	5.018,0	
2	Kawasan Konservasi Daerah (KKPD) Pulo Kauna Kayuadi	Kabupaten Kep. Selayar	Pergub Sul Sel no 3173/XII/2018	Suaka perikanan	3.983,0	
3	Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kabupaten Luwu Utara	Kabupaten Luwu Utara	SK Bupati no 287 tahun 2010		785	Luasan kawasan diperoleh dari Dokumen RPZ 2013
4	Kawasan Konservasi Daerah /KKPD Tupabiring	Kabupaten Pangkajene dan kepulauan	Pergub Sul Sel no 3172/XII/2018	Suaka perikanan	66.870	

5	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) Liukang Tangayya	Kabupaten Pangkajene dan kepulauan	Pergub Sul Sel no 3172/XII/2018	Suaka pulau kecil	500.737,77	Penamaan KKP3K dan jenis KKP tidak tercantum dalam SK Gubdernur dan SK Bupati tetapi baru disusulkan didalam RPZ
6	Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Teluk Bone Bagian selatan	Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai	Pergub Sul Sel no 2943/XI/2018	Suaka perikanan	423.942	
7	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Pulau Panikiang	Kabupaten Kabupaten Barru	Pergub Sul Sel no 2944/XI/2018	Suaka pesisir dan Suaka pulau kecil	605,94	RZWP3K Prov. Sul Sel mengarahkan ke suaka pesisir /Suaka pulau kecil kawasan ini belum memiliki pembagian zona baik pada SK pencadangan oleh Gubernur ataupun SK Bupati
Total Luas Usulan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)					1.001.941,71	

Sumber : Tim Penyusun Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP , Prov Sulawesi Selatan 2019

Upaya untuk melestarikan dan mengembalikan fungsi ekosistem pesisir sebagaimana penetapan kawasan konservasi diatas, juga diperlukan upaya reahabilitasi ekosistem pesisir yaitu salah satunya dengan melakukan penanaman mangrove. Hasil tanam mangrove yang dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada table 32. Aksi yang dilakukan melalui penanaman mangrove di masyarakat perlu dukungan dan kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan perairan. Oleh karenanya perlu melibatkan masyarakat sekitar mulai dari aktivitas penanaman hingga pemeliharaan dan membentuk kelompok konservasi (kompak)

Tabel 32 Upaya Konservasi Kawasan

NO	Upaya Rehabilitasi/konservasi	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Total
1	Rehabilitasi Mangrove (Ha)	3	23,2	53,3	79,5

Pada tahun 2020 target rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial adalah 0,28% dapat direalisasikan sebesar 1.002.018,20 atau 2,33 % atau mencapai 831,31 % dari target. Tingginya capaian disebabkan adanya perbedaan data luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) Liukang Tangayya dimana pada Data dokumen Lakip tahun 2018 diperoleh data luasan 171,931.71 ha yang ditetapkan di tahun 2017, sedangkan pada dokumen rencana zonasi WP3K diperoleh data luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) Liukang Tangayya seluas 500.737,77 ha. Sehingga ada koreksi luasan kawasan konservasi perairan daerah yang semula 674.105,80 ha menjadi 1.001.941,71 Ha.

Tabel 33. Realisasi kawasan lindung perairan Tahun 2015 - 2020

Bidang/Urusan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kawasan lindung perairan (Ha)	95,241.0	95,752.10	<b>1.001.944,71</b>	1.001.967,91	1.002.018,20
Total Luas perairan territorial (Ha)	43,047,900.0	43,047,900.0	43.047.900	43.047.900	43.047.900
<b>Rasio Kawasan Lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)</b>	<b>0.22</b>	0.22	2,32	2,32	2,33

Jika dibandingkan dengan target akhir akhir RPJMD yang akan dicapai pada tahun 2023 sebesar 0,34 maka telah dicapai 684,61% atau telah melampaui target akhir RPJMD.

INDIKATOR 5.2

PROPORSI TANGKAPAN IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN

Terkait kondisi pandemi covid dilakukan revisi target proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, yang semula ditargetkan 50,6 % direvisi menjadi 29,47 %. Pada tahun 2020 realisasi proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman adalah 52,18 % atau mencapai 177,07 % dari target 29,47. Proporsi tangkapan mengalami penurunan sebesar 2,63 % dari tahun 2019. Proporsi tersebut mengalami penurunan disebabkan produksi tangkap turun di tahun 2020. Manfaat Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan karena sebagai data kontrol produksi perikanan tangkap untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 38,80 % maka telah dicapai 134,49 % .

Data ini digunakan sebagai kendali data hasil tangkapan untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap tahun 2011 untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk provinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang

diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk provinsi sebesar 743.800 ton. Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh kabupaten/kota. Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan sehingga batasan biologis berada pada kategori aman dimana proporsi tangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan < 100%.

*Tabel 34. Realisasi Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Tahun 2016 - 2020*

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tangkapan Ikan (Ton)	312.380,8	359.770,1	363.853,0	398.565,2	388.130,8
80% dari Tangkapan Maksimum Lestari (Ton)	743.776	743.776	743.776,0	743.776,0	743.776,0
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	42,0	48,4	48,92	53,59	52,18

Dari tahun 2016 sampai dengan saat ini, proporsi tangkapan ikan di Sulawesi Selatan berada dalam batasan biologis yang aman. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman.

**d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran V**

*Tabel 35. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Sasaran V*

<i>Indikator Kinerja Sasaran</i>	<i>Capaian Kinerja (%)</i>	<i>Realisasi Anggaran (%)</i>	<i>Efisiensi</i>
1	2	3	4 (2-3)
Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	832,14	97,13	407,48
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	177,07		
Rata-Rata Capaian Kinerja	504,61		

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana.

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran V).**

Sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan SDKP melalui program sebagai berikut :

- ❖ **Program pengawasan , konservasi , penataan dan rehabilitasi pesisir dan Laut melalui kegiatan :**

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dan Perikanan (DAK) berupa perencanaan perahu pokmaswas , perencanaan garasi/speedboat, perencanaan speedboat penagawasan.
- Pengelolaan Kawasan konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan di 7 CDK dengan hasil kegiatan total luasan rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melakukan penanaman mangrove seluas 53,3 Ha
- Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan dengan total jumlah patroli 52 kali
- Pengawasan terpadu SDKP yang dilaksanakan dengan pembinaan kelompok pengawas (POKMASWAS)



*Gambar 19. Penanaman mangrove untuk merehabilitasi ekosistem mangrove*



*Gambar 20. Patroli Pengawasan IUU Fishing & Pemantauan Kapal Perikanan*



### **Faktor pendukung keberhasilan**

- ❖ Sarana prasarana pengawasan seperti speedboat pengawas, kapal pengawas, perlengkapan pengawasan untuk POKMASWAS yang mendukung kegiatan pengawasan
- ❖ Alokasi anggaran yang cukup mendukung untuk rehabilitasi ekosistem mangrove

### **Hambatan/masalah yang dihadapi**

- ❖ Aksi yang dilakukan melalui penanaman mangrove di masyarakat perlu dukungan dan kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan perairan
- ❖ Masih banyaknya ditemukan tindak Pidana Perikanan (Pelanggaran) selama patroli pengawasan IUU Fishing oleh CDK antara lain 1) Tidak Memiliki / Tidak Membawa Izin diatas kapal (SIPI/SIKPI/BPKP) 2) Menggunakan Alkap Terlarang / Trwals 3) Izin Habis Masa Berlakunya (daluarsa / tidak memiliki ke ,4) Menggunakan handak / bom ikan.
- ❖ Adanya refocusing anggaran DAK akibat pandemi sehingga pengadaan sarpras pengawasan tidak terlaksana

### **Solusi**

- ❖ Melibatkan masyarakat sekitar mulai dari aktivitas penanaman hingga pemeliharaan dan membentuk kelompok konservasi (kompak)
- ❖ Terkait perizinan dilakukan pendataan dan pembinaan nelayan agar tertib administrasi yaitu pemenuhan dokumen izin yang dipersyaratkan. Untuk kegiatan destructive dilakukan penindakan dengan membuat BAP

melibatkan aparat terkait (PPNS dan Polairud) untuk diproses secara hukum. Membina dan meningkatkan peran masyarakat untuk ikut dalam pengawasan dalam bentuk kelompok pengawas perikanan (POKMASAWAS)

- ❖ Pengadaan sarana prasarana pengawasan dialokasikan kembali dalam anggaran DAK tahun 2021

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Adapun Sumber pembiayaan pada tahun 2020 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

#### a. Pendapatan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, total target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2,460,425,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2,332,664,000 ,- (94,81 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 36. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,067,425,000	1,135,262,500	106.36

2.	Retribusi Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Prov. Sul-sel	1.000.000.000,-	825,140,000	82.51
3.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	393.000.000	371,851,000	94.62
	<b>Total</b>	2,460,425,000	2,332,664,000	94.81

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian intern Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di dalam pelaksanaan anggaran tersebut dilaksanakan melalui rapat monitoring yang dilakukan setiap minggu pertama setiap bulannya dan monitoring secara langsung di lapangan dengan peninjauan langsung kelokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan.

#### **b. Belanja**

Untuk tahun 2020 ini, total alokasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 50.471.491.834,- dan total realisasi sebesar Rp 44.779.637.275,- ( 88,72 %), dan realisasi fisik 96,76 % yang terdiri dari:

##### **1) Belanja Tidak Langsung**

Total alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp 25.463.134.634,- dengan realisasi Rp 23.845.907.020 ,- (93,65%), dan realisasi fisik 93,65 %. Realisasi fisik tidak mencapai 100 % disebabkan karena pembayaran TPP Desember belum terbayarkan dan menjadi hutang belanja tahun 2021.

##### **2) Belanja Langsung**

Alokasi anggaran untuk belanja langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp 25.008.357.200,- dengan realisasi Rp 20.933.730.255 ,- (83,71%), dan realisasi fisik 99,92 %.

Gambaran anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan yang bersumber pada anggaran APBD TA. 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 37. Realisasi Anggaran Dinas kelautan dan Perikanan TA. 2020

SUMBER ANGGARAN APBD	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
		KEUANGAN (Rp)	(%)	FISIK (%)
Belanja Tidak Langsung	25.463.134.634	23.845.907.020	93,65	93,65
Belanja Langsung	25.008.357.200	20.933.730.255	83,71	99,92
<b>T o t a l</b>	<b>50.471.491.834</b>	<b>44.779.637.275</b>	<b>88,72</b>	<b>96,76</b>

Adapun realisasi keuangan dan fisik berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 33. Realisasi keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan TA. 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA PAGU ANGGARAN	Keu%	Fisik%
BELANJA LANGSUNG	25.008.357.200	20.933.730.255	4.0474.626.945	83.71	99.92%
PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (PRIORITAS)	13.361.642.651	10.090.937.666	3.270.704.985	75.52	99,85%

DISEMINASI INOVASI TEKNOLOGI BUDIDAYA UDANG WINDU BERBASIS KAWASAN (SITTO BANGKIT)	3.131.176.051	2.837.899.250	293.276.801	90.63	100%
Terdapat sisa anggaran dikarenakan, belanja bahan bibit sebesar Rp. 149.956.000 dicatat menjadi hutang barang dan jasa tahun 2021, tidak dilaksanakannya kegiatan gemar ikan					
INOVASI TEKNOLOGI USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DAN KOMODITAS PERIKANAN LAINNYA	1.040.100.000	1.25.098.800	15.001.200	98.56	100%
Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan (UPT Provinsi) (DAK)	4.189.300.000	1.733.458.407	2.455.841.593	41.38	99,52%
<p>Terdapat sisa anggaran, dikarenakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. belanja printer, computer, meja kerja dan kursi kerja untuk kantor pelabuhan wilayah I menjadi hutang belanja modal tahun 2021,</li> <li>2. pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana air bersih di pelabuhan wilayah I dengan CDK pangkep menjadi hutang belanja modal tahun 2021</li> <li>3. belanja pengadaan perencanaan jaringan instalasi listrik PPI balambang kab luwu (DAK) 1 dokumen, perencanaan rehab turap penahan tanah PPI balambang kab luwu (DAK) 1 dokumen, perencanaan pembangunan breakwater PPI Lonrae kab bone, TERMIN III 100% pekerjaan perencanaan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi PPI Pontap, Pekerjaan I 50%, Termin II 75% dan Termin III 100% pekerjaan jalan komplek PPI Lonrae Bone, Perencanaan pekerjaan pembangunan Breakwater PPI Bonto Bahari (DAK), Perencanaan pekerjaan pembangunan Rehabilitas PPI Lonrae bone, Perencanaan pekerjaan pembangunan rehabilitas PPI Bontobahari kab maros, Perencanaan pembangunan PPI paotere (DAK), Perencanaan pekerjaan pembangunan /rehabilitasi PPI Beba Kab takalar 1 dokumen, dicatat sebagai hutang belanja modal tahun 2021</li> </ol>					
Pengadaan sarana dan prasarana usaha garam (DAK)	197.020.000	160.024.200	36.995.800	81.22	100%
Terdapat sisa anggaran, dikarenakan Perencanaan revitalisasi gudang garam rakyat (ukuran < 100 ton) di kab selayar, jeneponto dan kab takalar (DAK) dicatat sebagai hutang belanja barang dan jasa tahun 2021					
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Peningkatan Kapasitas Nelayan	2.715.000.000	2.327.679.900	387.320.100	85.73	100%

Terdapat sisa anggaran, dikarenakan pengadaan rumpon KUB Pasi Lalokong KUB ekor kuning KUB super kuning kab luwu 7 unit dan pengadaan bahan alat tangkap jaring dicatat menjadi hutang belanja barang dan jasa tahun 2021					
Inovasi teknologi produk olahan hasil kelautan dan perikanan konsumsi dan non konsumsi	928.546.600	854.893.509	73.653.091	92.07	100%
Terdapat sisa anggaran dikarenakan, bahan percontohan edukasi pencegahan stunting pada acara safari gemarikan, belanja survellen ISO/IEC 9001 2015 dicatat sebagai hutang belanja barang dan jasa tahun 2021					
Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan (DAK)	1.160.500.000	1.151.883.600	8.616.400	99.26	100%
<b>PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT</b>	<b>4.435.277.600</b>	<b>.4.292.761.900</b>	<b>142.515.700</b>	<b>96.79</b>	<b>100%</b>
Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (DAK)	140.320.000	139.729.500	590.500	99.58	100%
Pembangunan/Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil (DAK)	20.000.000	0	20.000.000	0	100%
Terdapat sisa anggaran dikarenakan, <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan kantor pengelola kawasan konservasi pulau cambang cambang 1 dokumen</li> <li>2. perencanaan tambat kapal/perahu di Pulau pulau kecil pulau gondong bali kab pangkep</li> <li>3. tambatan perahu di pulau libkang kec bara kota palopo, dicatat sebagai hutang tahun 2021</li> </ol>					
Pengawasan terpadu SDKP	49.500.000	49.131.800	368.200	99.26	100%
Pengelolaan kawasan konservasi perairan P3K dan pemanfaatan ekosistem perikanan	3.213.224.800	3.116.233.840	96.990.960	96.98	100%
Terdapat sisa anggaran dikarenakan, pengadaan pakaian kerja lapangan, baju pertemuan koordinasi dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir (CDK Luwu raya), pengadaan LCD (CDK Bosowasi), pengadaan komputer dan printer CDK bosowasi, dicatat sebagai hutang tahun 2021					

Pengawasan IUU fishing dan pemantauan kapal perikanan	1.012.232.800	987.666.760	24.566.040	97.57	100%
Terdapat sisa anggaran dikarenakan, pengadaan baju pertemuan pembinaan kelompok masyarakat pengawas wilayah CDK Luwu raya dicatat sebagai hutang tahun 2021					
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>5.479.057.649</b>	<b>5.109.552.361</b>	<b>369.505.288</b>	<b>93.26</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	911.871.449	625.917.603	285.953.846	68.64	100%
Terdapat sisa anggaran dikarenakan, 1. penambahan daya dan normalisasi instalasi jaringan listrik 1 paket dicatat sebagai hutang tahun 2021 2. efisiesi di dalam penggunaan anggaran listrik air dan telpon					
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	55.000.000	34.678.795	2.321.205	63.05	100%
Terdapat sisa anggaran dikarenakan adanya beberapa kendaraan dinas yang dihapus dan tidak dicatat lagi sebagai asset					
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	3.612.000.000	3.599.400.000	12.600.000	99.65	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	160.530.200	151.826.100	8.704.100	94.58	100%
Terdapat sisa anggaran dikarenakan, efisiensi di dalam penggunaan anggaran					
Penyediaan Makanan dan Minuman	260.306.000	219.663.500	40.642.500	84.39	100%
Terdapat sisa anggaran dikarenakan, 1. Fullboard pertemuan inovasi produk olahan hasil perikanan angkatan 2 dicatat sebagai hutang tahun 2021 2. beberapa kegiatan pertemuan dibatalkan dikarenakan pandemic					
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	479.350.000	478.066.363	1.283.637	99.73	100%
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.188.361.300</b>	<b>1.028.532.450</b>	<b>159.828.850</b>	<b>86.55</b>	<b>100%</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	426.673.300	374.405.500	52.267.800	87.75	100%
Terdapat sisa anggaran dikarenakan, pemeliharaan gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dicatat sebagai hutang tahun 2021					

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	761.688.000	654.126.950	107.561.050	85.88	100%
Terdapat sisa anggaran dikarenakan, 1. penggantian suku cadang kendaraan UPT/CDK dicatat sebagai hutang tahun 2021 2. efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja jasa service dan bahan bakar					
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>	<b>543.018.000</b>	<b>410.945.878</b>	<b>132.072.122</b>	<b>75.68</b>	<b>100%</b>
Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	365.917.800	241.595.512	124.322.288	66.02	100%
Terdapat sisa anggaran dikarenakan, efisiensi di dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah					
Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	112.700.000	107.918.800	4.781.200	95.76	100%
Terdapat sisa anggaran dikarenakan, efisiensi di dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah					
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	64.400.200	61.431.566	2.968.634	95.39	100%
Terdapat sisa anggaran dikarenakan, efisiensi di dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan belanja cetak					
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1.000.000	1.000.000	0	100	100%

**c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020**

**1. Program Hilirisasi Perikanan (Prioritas)**



Pada Tahun 2020 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.361.642.651- dengan realisasi keuangan Rp. 10.090.937.666,- (75,52 %) dengan realisasi fisik 99,85 %, Adapun tujuan program adalah Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing dengan hasil kegiatan adalah Desiminasi Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan (sitto bangkit) terealisasi 100 unit, Inovasi teknologi usaha perikanan budidaya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas perikanan lainnya terealisasi 465 paket sarana prasarana budidaya rumput laut, Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan (UPT Provinsi) (DAK) terealisasi sarana prasarana pelabuhan yaitu sarana prasarana air bersih di PPI pelabuhan wil 1 sebanyak 3 paket, jalan kompleks PPI Lonrea sepanjang 312,5 meter, jaringan listrik PPI Kajang, pengadaan sarana prasarana air bersih PPI wilayah pelabuhan wil 2 sebanyak 4 paket, drainase PPI Bontobahari Kab. Bulukumba. Pengadaan sarana dan prasarana usaha garam terealisasi revitalisasi gudang garam rakyat <100 ton di Kec. Bangkala Kab. Jeneponto 1 unit, pengadaan sarana peningkatan kapasitas nelayan jarring /alat tangkap 48 unit, mesin 19 unit, alat bantu tangkap 35 unit. Inovasi teknologi produk olahan hasil kelautan dan perikanan konsumsi dan konsumsi terealisasi 5 inovasi (sabun rumput laut, kerupuk rumput laut, otak-otak ikan dan siomay), Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan Hasil Perikanan (DAK) dengan jumlah perbaikan bangunan pengolahan unit pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil serta bantuan peralatan sebanyak 7 unit.

**2. Program Pengawasan, Konservasi, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut**

Pada Tahun 2020 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.435.277.600,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 4.292.761.900,- (96.79%) dengan realisasi fisik 100 %. Sasaran program adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan, dan meningkatnya kelestarian dan pengendalian dan pemanfaatan SDKP. Hasil kegiatan diantaranya adalah sarana dan prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK) terealisasi dokumen perencanaan pengembangan sarana pengawasan, Pembangunan/Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil (DAK) terealisasi dokumen perencanaan tambat kapal 2 dokumen dan perencanaan kantor pengelolaan kawasan konservasi 1 dokumen. Pengawasan terpadu SDKP terealisasi 30 kelompok masyarakat pengawas yang diberdayakan, pengelolaan kawasan konservasi, perairan P3k dan pemanfaatan ekosistem perikanan terealisasi penanaman mangrove seluas 53,3 Ha, pengawasan IUU fishing dan pemantauan kapal perikanan di 7 wilayah.

### **3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada Tahun 2020 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.479.057.649,- dengan realisasi keuangan Rp. 5.109.552.361,- (93,26%) dengan realisasi fisik 100 %, sasaran program ini adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan hasil kegiatan adalah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik terealisasi pembayaran biaya telepon, air dan listrik, penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional terealisasi roda 4 sebanyak 22 unit, roda 2 sebanyak 29 unit. Penyediaan jasa tenaga non PNS sebanyak 145 unit. Penyediaan alat tulis, barang cetakan dan penggandaan terealisasi penyediaan

alat tulis kantor, penyediaan makan minum, dan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sebanyak 108 kali rapat.

**4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada Tahun 2020 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.188.361.300,- dengan realisasi Rp. 1.028.532.450,- (86,55 %) dan fisik 100 %. Sasaran program adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Hasil kegiatan adalah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/asrama sebanyak 3 unit , pemeliharaan kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara 33 unit.

**5. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**

Pada Tahun 2020 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 543.018.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp.410.945.878,- (75,68%) dengan realisasi fisik 100 %. Sasaran program adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Hasil kegiatan adalah Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah terealisasi jumlah dokumen RKA , DPA, Renja, Renja Perubahan, dan Renstra.

**6. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

Pada Tahun 2020 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 1.000.000,- ( 100 %) dengan realisasi fisik 100 %. Sasaran program adalah Meningkatnya

akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Hasil kegiatan adalah penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sebanyak 8 laporan..

**d. Penghargaan yang Diterima**

Keberhasilan yang diraih ditahun 2020 adalah dengan diterimanya penghargaan :

- 1. Juara 5 Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 Kategori Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan**



2. **Juara 3 arsiparis teladan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. kepada staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 3**



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu unit organisasi lingkup Pemerintah Sulawesi Selatan yang diwajibkan membuat Laporan Kinerja Tahun 2020 dengan mengacu pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Sasaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulawesi Selatan sebesar 208,27% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Hal ini disebabkan beberapa indikator kinerja melampaui target yang diproyeksikan yaitu revisi target pasca pandemi diantaranya Produksi Perikanan dan Kontribusi PDRB perikanan.
- b. Terdapat indikator yang belum mencapai target seperti NTN dan rata-rata capaian kinerja Perangkat daerah, hal ini perlu menjadi perhatian.
- c. Terdapat satu sasaran strategis yaitu meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan indikator kinerja konsumsi ikan dan kontribusi ekspor tidak mendapat alokasi anggaran karena adanya refocusing anggaran.